



LAPORAN

AKHIR TAHUN

Sebagai
bahan refleksi akhir tahun kegiatan pengawasan
Inspektorat Jenderal tahun 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Tahun 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sebagai perwujudan peran dan layanan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021 fokus sebagai *quality assurance* dan *consulting*. Laporan Tahun 2021 ini bukan sekedar formalitas kewajiban pemenuhan pertanggung jawaban tetapi merupakan segala upaya dan jerih payah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam tahun mendatang.

Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2021, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal di lingkup Kementerian Hukum dan HAM harus terus berbenah diri. Masih banyak yang memerlukan optimalisasi sehingga pengawasan yang dilaksanakan lebih efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan konsultasi (*Consulting*).

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM, atas kerjasamanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

dan HAM. Untuk selanjutnya mohon masukan dan dukungan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Terima kasih.

Jakarta, Desember 2021
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 19651128 199103 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Dasar Hukum	5
E. Visi dan Misi Organisasi	6
F. Struktur Organisasi	6
G. Sumber Daya Manusia	9
H. Sumber Daya Anggaran	10
BAB II	
PENYELENGGARAAN RB, SPIP, MR, SAKIP	13
A. Penyelenggaraan RB Inspektorat Jenderal	13
B. Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	17
C. Penerapan MR Inspektorat Jenderal	23
D. Pelaksanaan SAKIP	28
E. Capaian Tarja	37
F. Capaian Monev Program dan Anggaran Kegiatan	40
BAB III	
CAPAIAN KINERJA	46
A. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja/ PK	46
B. Capaian Kinerja Pengawasan Inspektorat Wilayah dan Kegiatan Sekretariat	68
BAB IV	
PRENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM TAHUN 2022	90
A. Rencana Anggaran Tahun 2022	90
B. Program Kerja Pengawasan Tahunan	91
C. Audit Tematik	96
D. Panca Program Tahun 2022	96
BAB V	
PENUTUP	98
Kesimpulan	98
Kendala	98
Saran	98

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak terlepas dari perjalanan dalam mengawal pelaksanaan tugas sebagai unsur pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memberikan arah kebijakan dibidang pengawasan yaitu sebagai *quality assurance* dan *consulting* untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024.

Melalui kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan meningkatkan integritas pegawai, sehingga diharapkan dapat membangkitkan motivasi pegawai untuk meningkatkan integritas pelayanan publik guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan agar kualitas aparatur sesuai dengan era tuntutan sekarang ini, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan *best practice* mengenai peran dan fungsi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang kuat melalui :

- a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan pelaksana audit kinerja, audit kepatuhan (*compliance*) dan audit investigasi yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- b. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko;

- c. Pelaksana pendampingan/ rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan dan reuiu laporan keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan akhir tahun 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 yang telah diamanatkan, pelaporan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selama 1 (satu) tahun termasuk capaian kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan masukan dan bahan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tahun berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selama Tahun 2021 meliputi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal, penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal, pelaksanaan SAKIP Inspektorat Jenderal, capaian sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Jenderal, dan capaian lainnya serta rangkuman kegiatan pengawasan (audit, reuiu, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen) yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2021.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

E. VISI DAN MISI ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal mengemban visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
Visi:

Kementerian Hukum dan HAM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi:

Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan (Misi Nomor 7 Kemenkumham).

F. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program, Hubungan Masyarakat, dan Pelaporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Sistem Informasi Pengawasan;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Inspektorat Wilayah I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah I terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

3. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah III terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

5. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah,

Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Barat, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah IV terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah V terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

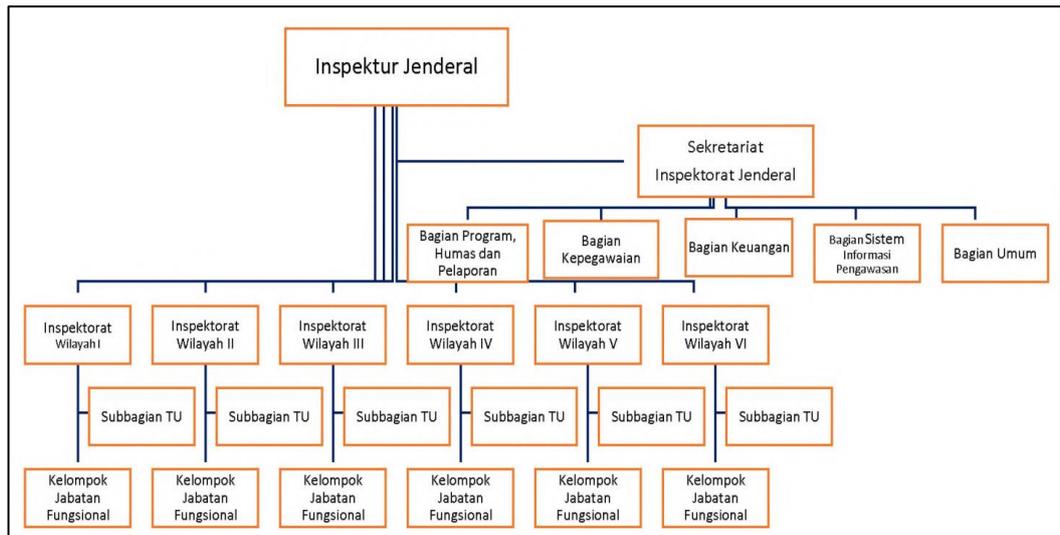
7. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi , Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasarakatan dan Akademi Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah VI terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



G. SUMBER DAYA MANUSIA

Bezetting keadaan pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2021 adalah sebanyak 281 orang yang terdiri dari:

Jenis Kelamin

Laki-Laki	153	Orang
Perempuan	128	Orang
TOTAL	281	Orang

Rincian Pegawai Inspektorat Jenderal

1	Pimpinan Tinggi Madya	1	Orang
2	Pimpinan Tinggi Pratama	7	Orang
3	Pejabat Administrator	5	Orang
4	Pejabat Pengawas	22	Orang
5	Pejabat Fungsional Auditor	133	Orang
6	Pejabat Fungsional Arsiparis	4	Orang
7	Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	5	Orang
8	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	1	Orang
9	Pejabat Pelaksana	53	Orang
10	CPNS	50	Orang
Total		281	Orang

H. SUMBER DAYA ANGGARAN

Pada Tahun 2021, Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat Jenderal TA 2021 yang telah mengalami 8 (delapan) kali revisi yaitu 3 (tiga) kali revisi anggaran level Direktorat Jenderal Anggaran dan 5 (lima) kali level Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut. Total pagu dalam DIPA Inspektorat Jenderal yang semula Rp74.461.972.000 (Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) berubah menjadi Rp61.842.998.000 (Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi-1, tanggal 17 Februari 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 0369-6948-4570-0141) yang semula Rp74.461.972.000 menjadi Rp69.442.328.000. Revisi ini pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran disebabkan penghematan anggaran dikarenakan percepatan penanganan wabah Pandemi Covid-19:
 - Inspektorat Wilayah I sampai dengan V melakukan Penghematan anggaran masing-masing sebesar Rp307.987.000;
 - Inspektorat Wilayah VI melakukan Penghematan anggaran sebesar Rp1.766.787.000;
 - Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1.712.922.000.
2. Revisi-2, tanggal 8 Maret 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS:0369-6948-4570-0141). Perubahan tersebut tanpa mengurangi atau menambah nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp69.442.328.000.
3. Revisi-3, tanggal 29 April 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 0369-6948-4570-0141). Perubahan tersebut tanpa mengurangi atau menambah nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp69.442.328.000.
4. Revisi-4, tanggal 24 Juli 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 4520-6132-5968-1403). Perubahan tersebut mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu semula sebesar Rp69.442.328.000 menjadi Rp66.861.328.000. Revisi ini pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran disebabkan penghematan anggaran dikarenakan percepatan penanganan wabah Pandemi Covid-19:

- Inspektorat Wilayah I sampai dengan V melakukan Penghematan anggaran masing-masing sebesar Rp300.000.000;
 - Inspektorat Wilayah VI melakukan Penghematan anggaran sebesar Rp450.000.000;
 - Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan penghematan anggaran sebesar Rp631.000.000.
5. Revisi-5, tanggal 6 Agustus 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 9092-1143-6670-7897). Perubahan tersebut mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu semula sebesar Rp66.861328.000 menjadi Rp61.842.998.000. Revisi ini pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran disebabkan penghematan anggaran dikarenakan percepatan penanganan wabah Pandemi Covid-19 dan Revisi Belanja Modal terkait perubahan RKBMN:
- Inspektorat Wilayah I sampai dengan VI melakukan Penghematan anggaran masing-masing sebesar Rp800.000.000;
 - Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan penghematan anggaran sebesar Rp218.330.000;
 - Revisi Belanja Modal terkait dengan perubahan:
 - a. Pengurangan pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp2.339.158.000;
 - b. Penambahan pengadaan fasilitas perkantoran sebesar Rp1.402.229.000;
 - c. Penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp936.929.000.
6. Revisi-6, tanggal 13 September 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 2596-5008-7045-7071). Perubahan tersebut tidak mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp61.842.998.000.
7. Revisi-7, tanggal 22 Oktober 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS:2596-5008-7045-7071). Perubahan tersebut tidak mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp61.842.998.000.
8. Revisi-8, tanggal 16 November 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 7793-0505-7500-8548). Perubahan tersebut tidak mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp61.842.998.000.

Adapun realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember TA 2021 sebesar Rp60.448.938.681 atau 97,75% (status 24 Desember 2021).

Terdapat selisih kurang apabila dibandingkan data antara *disbursement plan* Bulan Desember 2021 dengan realisasi per 24 Desember 2021 sebesar 2,25%. Hal ini disebabkan:

- Belanja Pegawai yang belum terealisasi yaitu uang makan pegawai Bulan Desember;
- Belanja Barang, masih ada beberapa kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan dan dalam proses pertanggungjawaban; dan
- Data *disbursement plan* yang digunakan adalah DP Bulan Desember.

Rincian Realisasi berdasarkan belanja:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Belanja Pegawai	18.061.223.000	17.858.239.078	98,88	202.983.922
Belanja Barang	39.123.617.000	38.659.803.235	98,81	463.813.765
Belanja Modal	4.658.158.000	4.526.349.417	97,17	131.808.583
Total	61.842.998.000	61.044.391.730	98,71	798.606.270

Realisasi Anggaran Tahun 2021



Rincian Realisasi berdasarkan kegiatan:

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Itwil I	4.025.228.000	4.016.131.609	99,77	9.096.391
Itwil II	4.033.462.000	4.022.970.963	99,74	10.491.037
Itwil III	4.034.212.000	4.026.596.986	99,81	7.615.014
Itwil IV	4.025.228.000	4.011.626.527	99,66	13.601.473
Itwil V	4.024.468.000	4.001.212.341	99,42	23.255.659
Itwil VI	6.786.686.000	6.777.255.947	99,86	9.430.053
Dukungan Manajemen	34.913.714.000	34.188.597.357	97,92	725.116.643
Total	61.842.998.000	61.044.391.730	98,71	798.606.270

BAB II

PENYELENGGARAAN RB, SPIP, MR, SAKIP

1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Sebagai Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dilakukan monitoring capaian nya per triwulan serta menginput data dukung dalam aplikasi e-RB Kemenkumham dan PMPRB online, meliputi 8 (delapan) unsur percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sebagai APIP telah melaksanakan workshop PMPRB, melakukan evaluasi dan reuiu PMPRB pada 11 Unit Eselon I.

Pada Laporan Capaian Nilai Usulan Indeks RB Kemenkumham Berdasarkan Hasil Reviu Atas Tindak Lanjut Perbaikan Lembar Kerja Penilaian (LKP) PMPRB Pusat dan 11 Unit Eselon 1 Tahun 2021 nilai capaian Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	LKP MANDIRI TINGKAT UE1 ITJEN	PENILAIAN INTERNAL OLEH ITJEN (TPI)
I	PENGUNGKIT (Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform)	36,30	33,80	34,92
A	ASPEK PEMENUHAN	14,60	14,29	14,60
	Manajemen Perubahan	2	2	2,00
	Deregulasi Kebijakan	1	1	1,00
	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	2	2,00
	Penataan Tata Laksana	1	1	1,00
	Penataan Sistem manajemen SDM	1,40	1,40	1,40
	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,50	2,50
	Penguatan Pengawasan	2,2	2,20	2,20
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,19	2,50
C	ASPEK REFORM	30	19,51	20,32
	Manajemen Perubahan	3	2,37	2,43
	Deregulasi Kebijakan	3	2,00	2,00
	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,5	1,50	1,50
	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75	3,75
	Penataan Sistem manajemen SDM	4,5	1,50	1,50
	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,29	3,44
	Penguatan Pengawasan	3,75	1,35	1,95
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	3,75

Berdasarkan hasil tersebut, masih terdapat saran perbaikan dari Tim Penilai Internal (TPI) pada komponen pengungkit yaitu aspek reform terkait area

Manajemen Perubahan bahwa dapat mendorong agen perubahan membuat perubahan yang konkret di Instansi 1 (satu) agen untuk 1 (satu) perubahan.

Adapun capaian pelaksanaan 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal meliputi:

- a) Manajemen Perubahan → telah berupaya/ berproses melaksanakan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN, dengan diantaranya mengimplementasikan Pancakomitmen dibaca oleh seluruh pegawai setiap Senin selepas apel pagi, internaslisasi tata nilai integritas dalam setiap rapat internal dan dalam apel pagi.
- b) Deregulasi Kebijakan → bahwa usulan Revisi Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagai salah satu target dalam Kepmenkumham tentang TARJA dan Kepmenkumham tentang Progsun Tahun 2021, sampai dengan Maret 2021 telah dilakukan 9 kali pembahasan, dan diputuskan untuk di undur ke Tahun 2022 mengingat belum ada Urgensi mendesak untuk segera di selesaikan di Tahun 2021, berdasarkan Berita Acara Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.UM.01.01-3224.
- c) Penataan dan Penguatan Organisasi → Kemenpan RB telah menetapkan berdasarkan Surat Menpan RB Nomor: B/251/M.KT.01/2021 perihal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal memiliki 1 Eselon I.a, 7 Eselon II.a, 2 Eselon III.a, 8 Eselon IV.a.
- d) Penataan Tata Laksana → telah berupaya/ berproses untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja melalui proses pemetaan SOP yang telah ada dan telah di Upload di e-sop.kemenkumham.go.id terdapat 163 SOP serta berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.1.UM.01.01- 3610/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 yang di tujukan kepada Para Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian perihal Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal, terdapat 16 SOP yang akan dilakukan Evaluasi di Tahun 2022. Selain itu telah ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang pengelola PPID Inspektorat Jenderal Tahun 2021. Serta berupaya mengimplementasikan salah satu panca komitmen “Transformasi Pengawasan berera digital, dengan mengintegrasikan aplikasi yang berjalan di Inspektorat menjadi satu aplikasi besar E-MAWAS (Elektronik Manajemen Pengawasan).

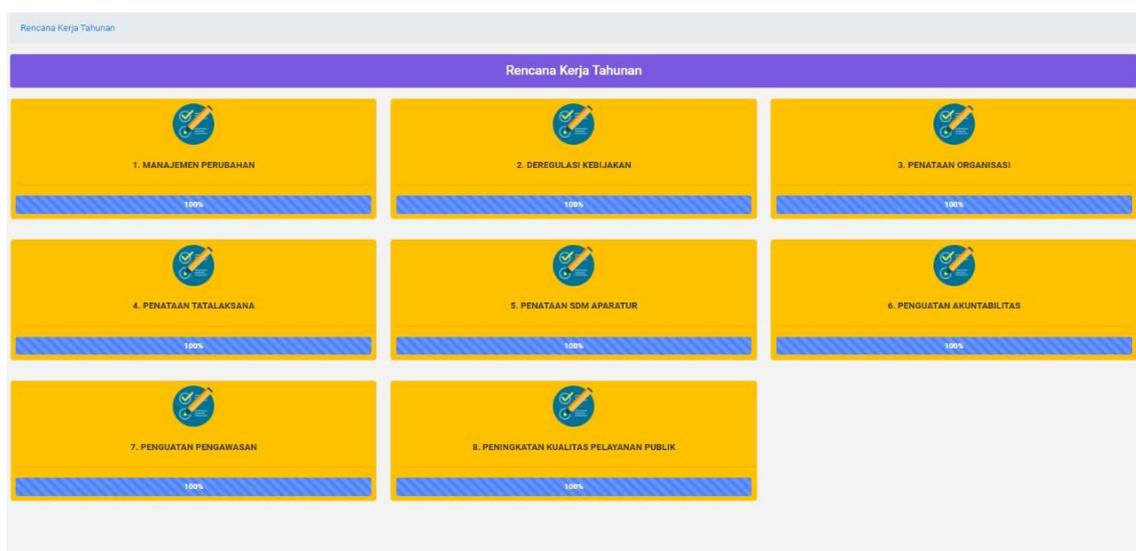
a) SOP yang akan dilakukan evaluasi di Tahun 2022

No	Nama SOP	Tidak Sesuai	Perubahan	Penghapusan	Keterangan
Inspektorat Wilayah IV Nomor : ITJ.5.UM.01.01-1714/XI/2021 tanggal 10 November 2021					
1.	ITJ.OT.02.02-23 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan		✓		Menunggu EMawas Kumham Selesai
Inspektorat Wilayah V Nomor : ITJ.6.UM.01.01-1097/XI/2021 tanggal 17 November 2021					
2.	ITJ.OT.02.02-25 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Reviu Laporan Kinerja (LKJ)		✓		Seharusnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3.	ITJ.OT.02.02-26 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Evaluasi SAKIP		✓		Seharusnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Bagian Keuangan Nomor : ITJ.1.UM.01.01 – 3776/XI/2021 tanggal 18 November 2021					
4.	ITJ.OT.02.02-44 Tanggal 10 Agustus 2016 SOP Pencairan Tunjangan Kinerja	✓		✓	Pencairan Tunjangan Kinerja sudah menggunakan mekanisme LS
5.	ITJ.OT.02.02-46 Tanggal 10 Agustus 2016 SOP Administrasi Perjalanan Dinas		✓		Penambahan SOP diantaranya SOP Administrasi Pengajuan Perjalanan Dinas melalui LS dan KKP, dan SOP Administrasi pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan perubahan pada dasar hukum
6.	ITJ.OT.02.02-47 Tanggal 10 Agustus 2016 SOP Pertanggung Jawaban Kegiatan	✓	✓		Sesuai temuan BPK dan Inspektorat Wilayah I
7.	ITJ.OT.02.02-43 Tanggal 10 Agustus 2016 SOP Pengajuan Tunjangan Kinerja			✓	Pada e.sop.kemenkumham.go.id masih SOP yang lama
8.	ITJ.OT.02.01-22 Tanggal 30 Maret 2021 SOP Pengajuan Revisi DIPA/Anggaran	✓	✓		Perbaikan pada Simbol
9.	ITJ.OT.02.01-26 Tanggal 30 Maret 2021 SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal Data Keuangan		✓		Rekonsiliasi internal dilakukan secara online melalui Google Form
10.	ITJ.OT.02.01-30 Tanggal 30 Maret 2021 SOP Pengajuan Uang Makan	✓			Pada e.sop.kemenkumham.go.id masih SOP yang lama

Inspektorat Wilayah III Nomor : ITJ.4.UM.01.01-1320/XI/2021 tanggal 22 November 2021					
11.	ITJ.OT.02.02-11 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Persiapan Pelaksanaan Perjalanan Dinas		✓		
12	ITJ.OT.02.02-12 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Pengadministrasian Tanggapan Atas Usul Hukuman Disiplin		✓		
13	ITJ.OT.02.02-13 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Pengadministrasian Tanggapan Atas Tindak Lanjut Pengawasan		✓		
14	ITJ.OT.02.02-14 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Pengadministrasian Telaahan Atas Pengaduan Masyarakat		✓		
15	ITJ.OT.02.02-15 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan		✓		
16	ITJ.OT.02.02-16 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 SOP Self Assessment Satuan Kerja Zona Integritas Wbk/Wbbm		✓		

- e) Penataan MSDM → telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pegawai Inspektorat Jenderal melalui kegiatan Gemar Belajar (Gerakan Lima Hari Belajar) yang merupakan salah satu Panca Program yang dicanangkan Inspektur Jenderal di Tahun 2021, dengan memberikan pembelajaran – pembelajaran terkait Teknis agar dapat meningkatkan ilmu – ilmu Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Serta melakukan Internalisasi terkait Kode Etik terbaru kepada seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal.
- f) Peningkatan Akuntabilitas → telah berupaya untuk tetap melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal secara berkala dan pelaksanaan terakhir 2021 pada tanggal 30 November 2021.
- g) Penguatan Pengawasan → telah berupaya untuk membentuk unit – unit Percontohan APIP dalam berbagai kategori, serta tetap berusaha mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bentuk komitmen nyata Inspektorat Jenderal dalam keikutsertaannya dalam kontestasi WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik → telah berupaya untuk selalu berinovasi dan bertransformasi untuk memberikan layanan terbaik memberikan kepada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk bukti nyata APIP sebagai *Consulting Partner* dan *Quality Assurance*.

Pada pelaporan B12 Kegiatan PMPRB dan Rencana Kerja Tahunan sudah tercapai 100% sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Unit Inspektorat Jenderal

Sebagai satuan kerja, Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 bahwa setiap satuan kerja wajib menyelenggarakan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan tersebut secara berkala. Penyelenggaraan SPIP

Inspektorat Jenderal meliputi 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern.

Dalam rangka terimplementasinya SPIP dan meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 serta menyusun Laporan Hasil Panel atas Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Berdasarkan surat Nomor ITJ.2.PW.03.02-66/XII/2021 hal Laporan Hasil Panel atas Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, Inspektorat Jenderal memperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 4,593 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 5 (optimum);
- b) Nilai Manajemen Resiko Indeks (MR) adalah 4,57;
- c) Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 4,44 (skor tertinggi 5);
- d) Hasil Panel menyebutkan terdapat kenaikan Nilai pada Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Resiko Indeks yaitu:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian/ Evaluasi	Hasil Panel	Naik/ turun
1	Maturitas penyelenggaraan SPIP	4,4	4,593	0.193
2	Manajemen Resiko Indeks (MR)	4,36	4,57	0.21
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,44	4,44	-

Dengan tingkat maturitas pada Level 5 (Optimum) menunjukkan bahwa telah diterapkannya pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal beberapa telah kami tindaklanjuti dan dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut kedepan sebagaimana matriks berikut:

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL EVALUASI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Output	Penanggung Jawab
1	Menyusun kebijakan/SOP terkait Kode Etik Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal merujuk kepada Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017	Menyusun SOP terkait Kode Etik Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Desember 2021	SOP Kode Etik Pegawai	Bagian Kepegawaian
2	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kode etik secara berkala dan mendokumentasikan pelaporannya	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kode etik secara berkala dan mendokumentasikan pelaporannya	<ul style="list-style-type: none"> • Desember 2021 • Juni 2022 • Desember 2022 	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kode etik	Bagian Kepegawaian
3	Menyusun SOP Capaian Kinerja yang berisiko tidak memenuhi target	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembahasan dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian untuk menyusun SOP atas kinerja yang tidak memenuhi target • Menyusun SOP Capaian Kinerja yang berisiko tidak memenuhi target 	Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rapat pembahasan • SOP Capaian Kinerja yang berisiko tidak memenuhi target 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator bagian PHP • Seluruh Inspektorat Wilayah dan Bagian
4	Melampirkan dokumen evaluasi peningkatan kompetensi dan keterampilan terhadap MR	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi peningkatan kompetensi dan keterampilan terhadap MR 	<ul style="list-style-type: none"> • Juni 2022 • Desember 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rapat pembahasan • Laporan evaluasi 	Bagian Kepegawaian

	keterampilan terhadap MR	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporrannya 		peningkatan kompetensi dan keterampilan Terhadap MR	
5	Melengkapi laporan evaluasi atas kegiatan komunikasi yang dilakukan internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala (kegiatan Penguatan Mitra Kerja Strategis)	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan setiap kegiatan PMKS (per kegiatan) Menyusun 41 Laporan evaluasi PMKS 	Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Laporan PMKS per kegiatan Laporan evaluasi PMKS 	Bagian Umum – Subbag TU PIM
6	Membentuk Unit Kepatuhan Internal pada Inspektorat Jenderal	Membentuk Unit Kepatuhan Internal unit Inspektorat Jenderal	Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rapat pembahasan SK Inspektur Jenderal 	Bagian Kepegawaian
7	Melakukan sosialisasi kebijakan/prosedur pengelolaan atas pengamanan fisik aset serta terdokumentasi secara lengkap	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi prosedur pengelolaan atas pengamanan fisik aset Menyusun laporan hasil sosialisasi Melakukan dokumentasi atas pengamanan fisik aset 	Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Laporan sosialisasi prosedur pengelolaan atas pengamanan fisik aset Laporan pengelolaan atas pengamanan fisik aset 	Bagian Umum
8	Melengkapi prosedur pendokumentasian Sistem Pengendalian Internal dan Kejadian Penting terkait BMN	Melengkapi prosedur pendokumentasian Sistem Pengendalian Internal dan Kejadian Penting terkait BMN	Februari 2022	Prosedur/ Kebijakan/ SOP pendokumentasian SPI dan kejadian penting	Bagian Umum

9	Membuat Buku Saku Pegawai tentang Kode Etik dan dokumentasi penerapan <i>reward and punishment</i> yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Buku Saku Pegawai tentang Kode Etik dan kode etik auditor • Mendokumentasikan reward and punishment yang ditetapkan Inspektur Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> • Februari 2022 • Triwulan I, II, III, dan IV 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Saku Pegawai tentang Kode Etik dan kode etik auditor • SK Irjen tentang <i>Reward and Punishment</i> 	Bagian Kepegawaian
10	Mengadakan program sertifikasi terkait MR untuk keanggotaan UPR dan pelatihan terkait MR baik tahunan maupun lima tahunan sampai dengan staf	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sertifikasi terkait MR (CRMO, CRMP, CRA, CME, CFE, CGAE dll) untuk keanggotaan UPR • Mengadakan pelatihan baik diklat/workshop/PKS dan lainnya tentang MR bagi seluruh pegawai 	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah sertifikasi MR • Sertifikat lulus MR untuk anggota UPR MR • Laporan pelaksanaan pelatihan/diklat/workshop MR 	Bagian Kepegawaian
11	Melengkapi data dukung terkait: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana tindak lanjut atas laporan penilaian standar kompetensi; b. Laporan dan evaluasi pengkomunikasian kebijakan pengelolaan SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana tindak lanjut atas laporan penilaian standar kompetensi; • Menyusun laporan dan evaluasi pengkomunikasian kebijakan pengelolaan SDM. 	Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan rencana tindak lanjut atas laporan penilaian standar kompetensi • Laporan monev pengkomunikasian kebijakan pengelolaan SDM. 	Bagian Kepegawaian

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL EVALUASI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP – HASIL PANEL APIP

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Output	Penanggung Jawab
1	Data dukung terkait pelaksanaan kegiatan satgas saber pungli, agar disinkronisasi dengan penganggarannya	Menyusun Laporan satgas saber pungli (UPP) yang didalamnya terdapat informasi tentang kegiatan dan anggarannya	Semester 2022	Laporan UPP	Bagian SIP
2	Melengkapi laporan PMKS Th.2021	Menyusun 41 Laporan evaluasi PMKS	Januari 2021	Laporan PMKS per kegiatan	Bagian Umum – Subbag TU PIM
3	Data dukung pembuktian tidak ada kejadian pelanggaran korupsi berupa rekapitulasi pengaduan (ELapor, WBS, Sipidu, dll)	Melengkapi laporan kejadian pelanggaran korupsi berupa rekapitulasi pengaduan (E-Lapor, WBS, Sipidu, dll)	Januari 2021	Laporan rekapitulasi pengaduan (ELapor, WBS, Sipidu, dll)	Koordinator Bagian SIP)

3) Penerapan Manajemen Risiko - Inspektorat Jenderal

Sebagai Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal menyusun Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021 berpedoman pada Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 meliputi Piagam Manajemen Risiko, Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Penanganan/Mitigasi Risiko dan Pemantauan Risiko. Penerapan Manajemen Risiko disusun pada level program Inspektorat Jenderal, level Kegiatan Inspektorat Wilayah dan level Kegiatan Dukungan Manajemen Sekkretariat Inspektorat Jenderal. Selanjutnya dilakukan Pemantauan atas penanganan risiko persemester dan diakhir tahun disusun Laporan Penerapan Risiko Tahun 2021. Selain itu sebagai APIP telah melaksanakan workshop Manajemen Risiko, pendampingan penyusunan risiko ke Kantor Wilayah, dan kegiatan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Berita Acara (BA) hasil evaluasi Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal tanggal 19 November 2021, bahwa tingkat kematangan MR Inspektorat Jenderal memperoleh nilai sebesar 83,06 berada pada level 4 (*Risk Managed*) dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN KOMPONEN		BOBOT	NILAI	NILAI TERTIMBANG
		A	B	C = A X B
A	NILAI REVIU DOKUMEN	80%	83.72	66.98
	I. BUDAYA DASAR RISIKO	80%	27.60	22.08
	II. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO	80%	17.12	13.70
	III. PROSES MANAJEMEN RISIKO	80%	22.75	18.20
	IV. HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	80%	16.25	13.00
B	NILAI PERSEPSI (SURVEI)	20%	-	16.08
NILAI TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				83.06
Berdasarkan hasil pertimbangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berada pada tingkat				
RISK MANAGED (LEVEL 4)				

Terhadap hasil evaluasi tersebut, masih terdapat rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Sampai dengan saat ini beberapa telah kami tindaklanjuti dan dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut kedepan sebagaimana matriks berikut:

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Output	Penanggung Jawab
1	Menyusun kebijakan/ peraturan terkait mekanisme pemberian penghargaan atas penerapan MR di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Melaksanakan penyusunan kebijakan pemberian penghargaan pegawai yang berkontribusi dalam proses penerapan MR	Februari 2022	SE Inspektur Jenderal	Bagian Kepegawaian
2	Membentuk Unit Kepatuhan Internal pada Inspektorat Jenderal	Membentuk Unit Kepatuhan Internal unit Inspektorat Jenderal	Januari 2022	SK Inspektur Jenderal	Bagian Kepegawaian
3	Merencanakan pelatihan sertifikasi MR bagi seluruh anggota UPR	Melaksanakan pelatihan dalam bentuk diklat/ aktif belajar/ workshop/ FGD/ PKS tentang MR untuk seluruh pegawai	Februari 2022	SP Inspektur Jenderal Pelatihan MR	Bagian Kepegawaian
4	Menyusun identifikasi risiko terkait kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana tindak lanjut penanganannya	Menyusun identifikasi risiko terkait kemitraan	Desember 2021	MR Kemitraan	Bagian PHP (Selesai)
5	Merumuskan risiko, penyebab, dampak dan pengendalian terkait pencapaian kinerja yang berisiko tidak memenuhi target	Melaksanakan pembahasan dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian untuk menyusun SOP atas kinerja yang tidak memenuhi target	Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan • SOP Kinerja yang tidak tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator bagian PHP • Seluruh Inspektorat Wilayah dan Bagian

6	<p>Merumuskan rencana penanganan risiko sesuai dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukan merupakan pengendalian internal/ bagian SOP Merupakan kegiatan terobosan/ bukan kegiatan rutin Mampu menurunkan dan mencapai toleransi risiko Mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah Merupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggungjawab Satker 	<p>Mengajukan pendampingan ke Inspektorat Wilayah I untuk menyusun penanganan risiko dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukan merupakan pengendalian internal/ bagian SOP Merupakan kegiatan terobosan/ bukan kegiatan rutin Mampu menurunkan dan mencapai toleransi risiko Mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah Merupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggungjawab Satker 	Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal ke Inspektur Wilayah I hal permintaan pendampingan Laporan hasil pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian PHP Inspektorat Wilayah I
7	<p>Meingkatkan capaian/realisasi atas rencana penanganan risiko sesuai target output</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2021 dan seterusnya agar dalam melakukan evaluasi pemantauan MR meminta kepada Itwil/ Bagian untuk memenuhi data dukung output yang wajib ada dalam kegiatan pengendalian dan indikator risiko Itwil dan Bagian wajib menyampaikan data dukung yang diperlukan dalam penanganan MR per Semester 	<ul style="list-style-type: none"> Desember 2021 Juni 2022 Desember 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Data dukung terkait pemantauan MR (Data dukung kegiatan pengendalian dan data dukung indikator risiko) Nota dinas Sekretaris Inspektorat 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator bagian PHP Seluruh Inspektorat Wilayah dan Bagian

		<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan di setiap level untuk lebih sadar tentang pemantauan MR 		Jenderal ke Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian hal permintaan data dukung penanganan MR	
8	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan selaku koordinator Satgas UPR untuk melakukan reviu penerapan MR	Menyusun surat Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan tentang penyampaian rekomendasi APIP bahwa Sekretariat Jenderal wajib melakukan rivi penerapan MR	Januari 2022	Surat Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal	Bagian PHP
9	Melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap risiko residual yang melebihi toleransi risiko	Melaksanakan evaluasi atas RTP yang melebihi toleransi risiko	Februari 2022	Laporan Evaluasi	Bagian PHP
10	Melengkapi/ menyajikan informasi data <i>residual risk</i> pada laporan pemantauan MR	Di Tahun 2021 untuk melengkapi data <i>residual risk</i> pada laporan pemantauan MR	Desember 2021	Laporan Pemantauan MR Semester II 2021	Bagian PHP
11	Melakukan langkah perbaikan untuk pencapaian target atas	Melaksanakan pembahasan dengan Itwil dan Bagian tentang Pencapaian Target Kinerja Tahun	Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Notula Rapat Berita Acara Perubahan PK 	Bagian PHP

	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	2021 Mengajukan Trilateral Meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) serta Biro Perencanaan tentang perubahan target PK yang beresiko tidak tercapai		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil Trilateral Meeting • PK Perubahan 	
--	------------------------------------	--	--	--	--

4) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Inspektorat Jenderal

Sebagai Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan dan perjanjian kinerja meliputi penyusunan konsep Renstra yang didalamnya memuat Aspek Strategis Organisasi, Pemasalahan utama, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan serta menyusun Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran. Kemudian dilakukan monitoring atas Capaian Kinerja Organisasi melalui aplikasi Smart-DJA pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart> dan aplikasi Monev RKP Bappenas pada website <https://e-monev.bappenas.go.id/2021> dan aplikasi e-performance.kemenkumham.go.id. Selanjutnya dilakukan analisis atas capaian kinerja dimaksud dan dituangkan dalam LKJIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021. Adapun sebagai APIP telah melaksanakan workshop SAKIP dan melakukan evaluasi SAKIP pada 11 Unit Eselon I dan reviu Kementerian.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal memperoleh hasil evaluasi implementasi SAKIP sebesar 82,94 atau Predikat A (memuaskan) yaitu memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel dengan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Sampai dengan saat ini rekomendasi tersebut telah kami tindaklanjuti sebagaimana matriks berikut:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Sakip

Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja		
	<p>a. Agar Tujuan dalam Renstra Itjen dilengkapi dengan indikator/ukuran keberhasilan yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan cukup</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal dilakukan dengan mempertimbangkan Balance Scorecard serta telah dilakukan pembahasan dengan Bappenas sehingga telah memenuhi kriteria SMART dan cukup - Bahwa tujuan dalam RENSTRA merupakan keterkaitan antara sasaran RPJMN dengan Misi Presiden dengan Kemenkumham dengan Misi ITJEN. Tujuan yang telah ditetapkan diturunkan dalam Sasaran Kemenkumham dan ITJEN. Kemudian sasaran ini yang ditetapkan indikator dan targetnya pertahun, sebagaimana tertera dalam Tabel 4 Hal 25 Renstra ITJEN. <i>(sumber : Consultan GML saat penyusunan Renstra Kumham, Narasumber KemenpanRB, DIKLAT Sertiikasi gelas CSEP-Certified Strategy Execution Profesional)</i> - Di dalam aplikasi RENJA KRISNA maupun dalam Aplikasi SAKTI RKAKL, untuk tujuan tidak ada pilihan untuk pengisian indikator/target <i>(sumber data : aplikasi RENJA-Bappenas dan RKAKL-DJA Kemenkeu)</i> - Bahwa Itjen mengemban tujuan nomor 7 dalam Renstra Kemenkumham yaitu mewujudkan ASN Kemenkumham yang kompeten dan terlaksananya RB di Kemenkumham. Sehingga untuk menetapkan indikator/ ukuran keberhasilan pada tujuan tersebut harus terlebih dahulu disepakati pada level Kementerian. 	<p>Data Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra 2. Renstra Itjen 3. Dokumentasi Rapat Penyusunan Renstra 2020 s.d. 2024

	<p>b. Agar melakukan reviu terhadap penetapan target dalam Renstra Itjen sehingga memenuhi kriteria: menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, selaras dengan perencanaan strategis, relevan dengan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan argumentasi/perhitungan yang logis</p>	<p>Penyusunan Renstra 2020 s.d. 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian 2015 s.d. 2019 serta disusun bersama dengan Biro Perencanaan yang juga mengundang Bappenas sebagai Narasumber serta melewati proses pembahasan dengan APIP Inspektorat Jenderal.</p> <p>Reviu atas capaian target dalam RENSTRA dapat dimonitor dalam laporan berkala Itjen.</p> <p>Bahwa telah dilaksanakan reviu atas risiko tidak tercapainya target dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan telah dilakukan <i>Trilateral Meeting</i> (TM) dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan didampingi Biro Perencanaan</p>	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Pimpinan Yogya dan Royal Tulip 2. BA Perubahan IKU IKK 3. Laporan Hasil TM dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
	<p>c. Agar melakukan monitoring atas capaian target-target dalam Renstra dan hasil monitoring tersebut ditindaklanjuti.</p>	<p>Monitoring atas capaian target Renstra dilakukan secara berkala dengan monitoring dan evaluasi baik secara manual dengan kegiatan rapat maupun melalui aplikasi baik Aplikasi eksternal seperti SMART dan E-Monev serta Aplikasi Internal yaitu E-Performance. Pengisian dalam aplikasi tersebut mempengaruhi dan menjadi dasar atas pengambilan keputusan pada tahun berjalan maupun untuk perencanaan pada tahun berikutnya.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, kami juga telah melakukan reviu/ pembahasan bersama atas risiko tidak tercapainya target dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan telah dilakukan <i>Trilateral Meeting</i> (TM) dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan didampingi Biro Perencanaan</p>	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulan I dan Semester 2. Screen Capture Aplikasi 3. Nota Dinas permintaan capaian kinerja 4. Laporan Rapat Pimpinan Yogya dan Royal Tulip 5. BA Perubahan IKU IKK 6. Laporan Hasil TM dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
	<p>d. Agar capaian atas kinerja yang diperjanjikan (PK) dijadikan</p>	<p>Bahwa saat ini <i>reward and punishment</i> diberikan melalui kenaikan pangkat, diklat dan pemberian tunker. Sedangkan <i>punishment</i> tidak</p>	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan pegawai

	acuan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	diberikan karena sampai saat ini pimpinan ITJEN tidak ada yang melanggar ketentuan. Penerapan atas pencapaian target PK dalam proses pelaksanaan sesuai dengan PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Kinerja PNS dimana penyusunan SKP berdasar pada indikator dan target dalam RENSTRA/ RENJA/ PK. Adapun PK hanya menjangkau s.d Es I dan Es 2 berdasarkan PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> 2. PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 3. PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 4. Konsep New SKP Es 1 dan Es 2
	e. Agar menyusun Rencana Aksi atas IKU indeks persepsi integritas Kemenkumham	Telah dilakukan <i>Trilateral Meeting</i> (TM) dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan didampingi Biro Perencanaan bahwa IKU terkait Persepsi Integritas diturunkan pada level IKK Sekretaris Inspektorat Jenderal	Data dukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi PK Sekretariat Inspektorat Jenderal
	f. Agar menyusun mekanisme dan mengimplementasikan kebijakan <i>reward and punishment</i> terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target pada Rencana Aksi	Bahwa <i>reward and punishment</i> diberikan kepada pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, pegawai teladan, serta penjatuhan hukuman disiplin. Penerapan atas rencana aksi pada pencapaian target PK dapat disusun setelah diberlakukannya PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Kinerja PNS di lingkungan Itjen. Mekanisme <i>reward and punishment</i> terhadap capaian PK tertuang juga dalam aturan tersebut.	Data dukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 2. PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 3. Konsep New SKP Es 1 dan Es 2
	g. Agar rencana aksi dimanfaatkan untuk otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan suatu kegiatan	Penerapan atas rencana aksi pada pencapaian target PK dapat disusun setelah diberlakukannya PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Kinerja PNS di lingkungan Itjen.	Data dukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021

			<ul style="list-style-type: none"> 2. PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 3. Konsep New SKP Es 1 dan Es 2
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja		
	a. Agar IKU indeks persepsi integritas Kemenkumham dibreakdown kepada kinerja Individu	Telah dilakukan <i>Trilateral Meeting</i> (TM) dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan didampingi Biro Perencanaan bahwa IKU terkait Persepsi Integritas diturunkan pada level IKK Sekretaris Inspektorat Jenderal.	<p>Data dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Revisi PK Sekretariat Inspektorat Jenderal
	b. Agar dalam melakukan pengumpulan data kinerja dilakukan mekanisme pengujian/koreksi untuk memastikan kelengkapan data kinerja	<p>Pengumpulan bahan laporan telah dilakukan sesuai dengan prosedur SOP melalui Nota Dinas Eselon II Fasilitatif (Sekretaris Inspektorat Jenderal) serta bahan laporan disampaikan dalam bentuk Nota Dinas Eselon II Teknis (Inspektur Wilayah) sehingga data kinerja telah dikoreksi dan diuji melalui pimpinan ada masing masing Itwil/ Bagian. Selanjutnya konsep laporan disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk pengujian/koreksi selaku <i>Quality Control</i> untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan tertinggi yaitu Inspektur Jenderal.</p> <p>Selain itu, data kinerja yang diinput dalam aplikasi monitoring, telah lebih dulu kami lakukan koordinasi dengan ITWIL-Bagian melalui nota dinas dan koordinasi langsung untuk menginput data capian per triwulan (operator pada masing-masing Itwil dan PHP). Penjelasan data capian tertuang dalam aplikasi tersebut.</p> <p>Tindak lanjut dilakukan dengan mengirim data yang telah diinput oleh ITWIL/Bagian tersebut dengan kami cek terlebih dahulu untuk kesesuaian data dukung nya, setelah sesuai kami submit data ke DJA</p>	<p>Data dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SOP pada Subbag Evalap terkait Tarja, Penyusunan Laporan dan Monitoring 2. Nota dinas permintaan data 3. Nota dinas Itwil pengumpulan data 4. Screen Capture Aplikasi 5. Laporan penyelenggaraan sosialisasi pengisian teknis Aplikasi SMART

		Kemenkeu (SMART), Bappenas (e-Monev RKP) dan Biroren (e-Performance).	
	c. Agar IKU dijadikan dasar promosi/kenaikan/penurunan pangkat. Menyusun kebijakan terkait pemberian reward and punishment atas capaian indikator kinerja utama. selanjutnya hasil dari pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk: penilaian kinerja, insentif dan disinsentif, promosi, dan kenaikan/penurunan peringkat.	<p>Promosi/ kenaikan/ penurunan pangkat yang berlaku berdasar pada ketentuan peraturan yang berlaku di kepegawaian.</p> <p>SKP individu saat ini dalam proses penyusunan sesuai dengan PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 dan aplikasi SIMPEG dalam proses pengembangan untuk memfasilitasi sesuai PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021.</p> <p>Kebijakan dapat disusun setelah diberlakukannya PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Kinerja PNS di lingkungan Itjen.</p>	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021
	d. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja eselon IV ke atas dalam bentuk reward and punishment.	Bahwa <i>reward and punishment</i> diberikan kepada pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, pegawai teladan, serta penjatuhan hukuman disiplin.	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 2. PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 3. Konsep New SKP Es 1 dan Es 2
	e. Agar melakukan reviu atas IKU Itjen	Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu atas IKU dan IKK yang dilaksanakan pada Kegiatan Evaluasi Semester I yang dilaksanakan bersama dengan Pimpinan Tinggi di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan yang selanjutnya atas hasil reviu tersebut diinisiasikan untuk melakukan revisi target IKU dan IKK yang menyesuaikan dengan kondisi kinerja.	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu IKU-IKK pada Evaluasi Sem I 2021 2. Rapat Pembahasan Revisi IKU ke-2 3. Rapat Pembahasan Revisi IKU ke-1

	f. Agar hasil pengukuran rencana aksi/ target kinerja tidak hanya menyimpulkan capaian kinerja namun memuat sasaran/strategi untuk mencapai sasaran.	Rencana aksi merupakan penjabaran dari sasaran, rencana aksi terpenuhi/tidak merupakan gambaran dari implementasi sasaran tersebut. Sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan perubahan PK atas IKU dan IKK	Data dukung: 1. Revisi PK Es 1 dan 2 2. BA Perubahan IKK
3.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja		
	a. Agar LKIP menyajikan informasi keuangan yang dapat dikaitkan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja	Tindak Lanjut atas rekomendasi ini akan dilaksanakan pada periode penyusunan LKIP Tahun 2021 Pada RENSTRA (Bab IV, Target kinerja dan Kerangka Pendanaan) sudah terdapat informasi keuangan yang dikaitkan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja. Selain itu, cescading visi misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program dan sasaran egiatan dituangkan dalam bentuk pohon kinerja (Bab II RENSTRA). Namun pada Aplikasi KRISNA RENSTRA, KRISNA RENJA dan SAKTI RKAKL belum mengakomodir informasi anggaran berdasarkan IKU IKK dan pada aplikasi SPAN sebagai aplikasi Monev keuangan Kementerian juga tidak mengakomodir informasi realisasi berdasarkan IKU IKK.	Data dukung: Renstra Itjen
	b. Agar LKIP menyajikan data kinerja yang lengkap dan valid, a.l data kinerja pada IKU Indeks persepsi Integritas Kemenkumham (terkait penetapan responden survey)	Tindak Lanjut atas rekomendasi ini akan dilaksanakan pada periode penyusunan LKIP Tahun 2021 Penetapan responden tertuang dalam SK Irjen Nomor ITJ-07.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas	Data dukung: SK Irjen Nomor ITJ-07.OT.02.02 Tahun 2019

	dan data kinerja pada IKK Persentase pemanfaatan penerapan MR dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker di lingkungan Inspektorat Wilayah;		
	c. Agar LKIP memuat rekomendasi yang memadai terkait perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program kegiatan dan peningkatan kinerja.	Tindak Lanjut atas rekomendasi ini akan dilaksanakan pada periode penyusunan LKIP Tahun 2021 Rekomendasi dalam LKIP Tahun 2020 yang kami susun terkait: a. komitmen pimpinan sangat kami butuhkan implementasi nyatanya baik dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan pelaporan kinerja b. Kerjasama yang solid dalam internal ITJEN (bahwa penyusunan target kinerja, implementasi kinerja dan penyusunan kinerja adalah tugas Bersama bukan tugas salah satu bagian/individu yang sangat menentukan keberhasilan kinerja atsa tugas, fungsi dan keberhasilan itjen c. Peningkatan internalisasi tata nilai untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab	
4	Evaluasi atas Evaluasi Internal		
	a. Agar pelaksanaan evaluasi atas Rencana Aksi/Target Kinerja dan tindak lanjut atas hasil evaluasi didokumentasikan secara lengkap, a.l hasil evaluasi memuat pembahasan dan saran/rekomendasi yang telah disepakati dan dokumen	Inspektorat Jenderal sampai dengan Bulan Oktober telah melakukan evaluasi atas kinerja secara rutin setiap bulannya yang dituangkan kedalam Laporan Bulanan. Kegiatan Evaluasi juga dilaksanakan pada Rapat Capaian Kinerja Triwulan I pada Bulan Maret dan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I pada Bulan Juni Tahun 2021 serta Capaian Kinerja Triwulan III.	Data dukung: 1. Laporan Evaluasi Program 2. Rapat Evaluasi Triwulan I 3. Rapat Evaluasi Semester I 4. Laporan Evaluasi Triwulan III

	tindak lanjut memuat perbaikan yang telah dilakukan sebagaimana rekomendasi;	Sebagai bentuk hasil evaluasi, kami telah melaksanakan TM dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan didampingi Biro Perencanaan terkait IKU IKK.	
	b. Agar melakukan evaluasi program secara berkala (minimal semesteran). Laporan evaluasi program menyajikan informasi tentang caaian hasil program, simpulan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan serta rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja	Inspektorat Jenderal sampai dengan Bulan Oktober telah melakukan evaluasi atas kinerja secara rutin setiap bulannya yang dituangkan kedalam Laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester.	Data dukung: Laporan Evaluasi Program
5	Evaluasi atas Capaian Kinerja		
	Agar meningkatkan capaian kinerja terhadap beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memenuhi target	Upaya peningkatan capaian kinerja telah dilakukan secara rutin dan optimal melalui monitoring dan evaluasi yang tertera dalam laporan berkala. Selain itu, Itjen juga telah meningkatkan fungsi monitoring oleh Pimpinan melalui pelaksanaan Rapim secara rutin.	Data dukung: 1. Laporan Evaluasi Program 2. Rapat Evaluasi Triwulan I 3. Rapat Evaluasi Semester I 4. Laporan Evaluasi Triwulan III

5) Capaian Pelaksanaan Target Kinerja (TARJA) Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal melakukan langkah-langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021. Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut Inspektorat Jenderal memiliki kewajiban untuk melaksanakan target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan
1.	Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal	1. Implementasi SPIP dan meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM
		2. Implementasi Manajemen Risiko
		3. Revisi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018
2.	Penguatan Satuan Kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Terbentuknya Zona Integritas pada satuan kerja menuju WBK/WBBM
		2. Terimplementasinya Peran Tunas Integritas
3.	Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan SAP	Laporan Keuangan sesuai dengan SAP melalui audit, pendampingan, reviu dan pemantauan
4.	Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai SAKIP minimal "A"
5.	Terlaksananya Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan dan tepat waktu
6.	Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya PMPRB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya dapat dilihat Rekapitulasi Capaian atas setiap target kinerja Inspektorat Jenderal dari Triwulan I s.d IV sebagai berikut:

No	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Capaian Triwulan I	Capaian Triwulan II	Capaian Triwulan III	Capaian Triwulan IV
1.	Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal	1. Implementasi SPIP dan meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	Belum verifikasi
		2. Implementasi Manajemen Risiko	100	100	100	Belum verifikasi
		3. Revisi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018	100	100	-	-
2.	Penguatan Satuan Kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Terbentuknya Zona Integritas pada satuan kerja menuju WBK/WBBM	100	100	80	Belum verifikasi
		2. Terimplementasinya Peran Tunas Integritas	100	100	100	Belum verifikasi
3.	Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan SAP	Laporan Keuangan sesuai dengan SAP melalui audit, pendampingan, reviu dan pemantauan	100	100	100	Belum verifikasi

4.	Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai SAKIP minimal "A"	100	100	100	Belum verifikasi
5.	Terlaksananya Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	Belum verifikasi
6.	Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya PMPRB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100	90	100	Belum verifikasi

Selain target kinerja Inspektorat Jenderal sebagai unit Eselon I, Inspektorat Jenderal juga menurunkan target kinerjanya ke Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021. Adapun target kinerja tersebut berupa :

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
1.	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan nilai maturitas SPIP	1. Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada Peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP	Meningkatnya tingkat Maturitas SPIP Kemenkumham terdefinisi dengan predikat terdefinisi (Level 4)
		2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018
2.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan Pemeriksaan BPK Tahun 2018 kebawah nihil

Capaian target kinerja kantor wilayah selanjutnya diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal terhadap data dukung yang telah di upload dalam aplikasi Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM pada laman: <https://kinerja.kemenkumham.go.id>.

6) Capaian pelaksanaan Monitoring Program/Anggaran/Kegiatan

a) Monitoring pada SMART

Monitoring dilaksanakan dengan melakukan penginputan pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan di laman <https://smart.kemenkeu.go.id/> yang dilaksanakan pada layer Unit dan Satker.

Capaian sasaran program sebagai berikut:

SMART | KEMENKUU

smart.kemkenku.go.id/app2021/unit/form_ikp_rain/V0E=/MTM=

Program : WA. Program Dukungan Manajemen

! : Belum dikonfirmasi oleh level Kementerian
x : Dikembalikan oleh level Kementerian untuk dikoreksi kembali
✓ : Sudah dikonfirmasi oleh level Kementerian

No.	Periode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Kinerja Program (%)	Keterangan	Status	Simpan
1	Tahunan	05 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang Akuntabel	01 Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (Nilai)	WTP	100,00	berdasarkan LHP BPK	!	🔒
2	Tahunan	06 Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang Partisipatif dan Profesional dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	01 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM (Nilai/Level)	Level 3 - Terdefinisi	141,67	Telah dilakukan	!	🔒
3	Tahunan	07 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	03 Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (%)	6	192,17	Berdasarkan hasil evaluasi	!	🔒
4	Tahunan	07 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	04 Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM (%)	66,0	139,12	Telah terlaksana	!	🔒

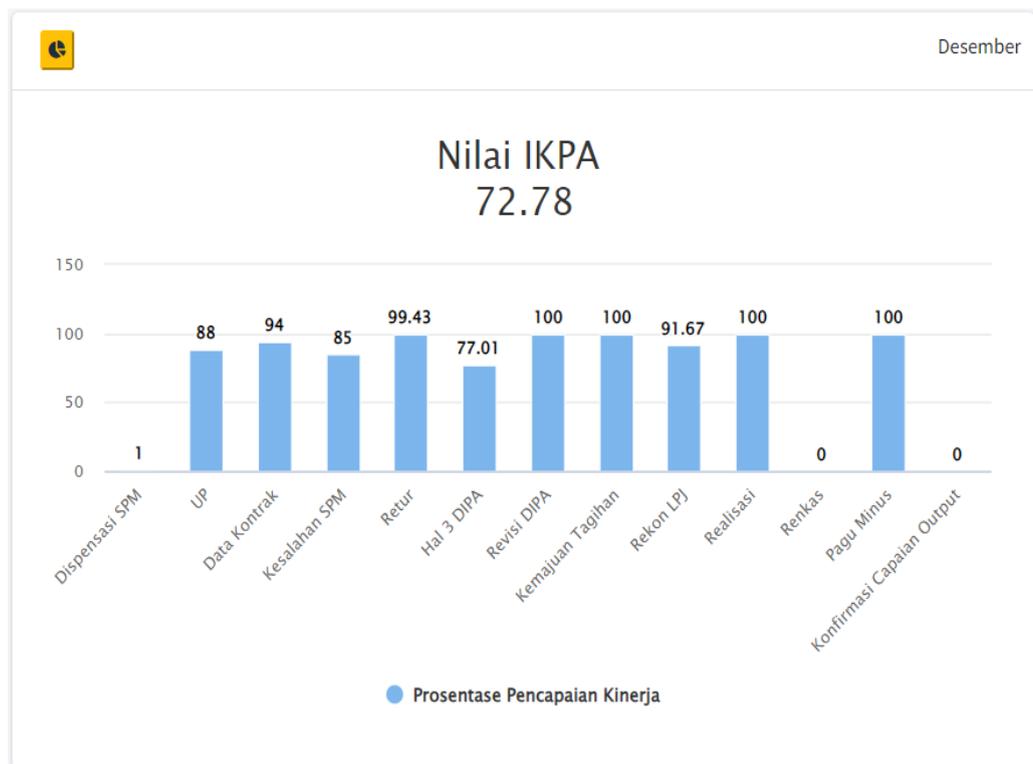
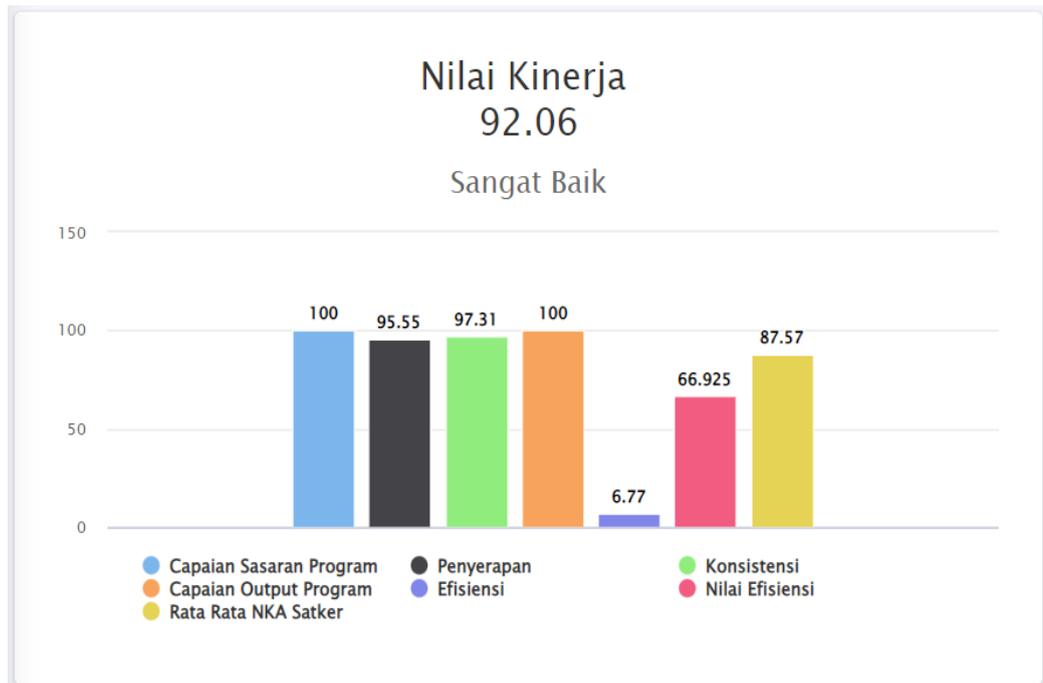
Capaian sasaran output program sebagai berikut:

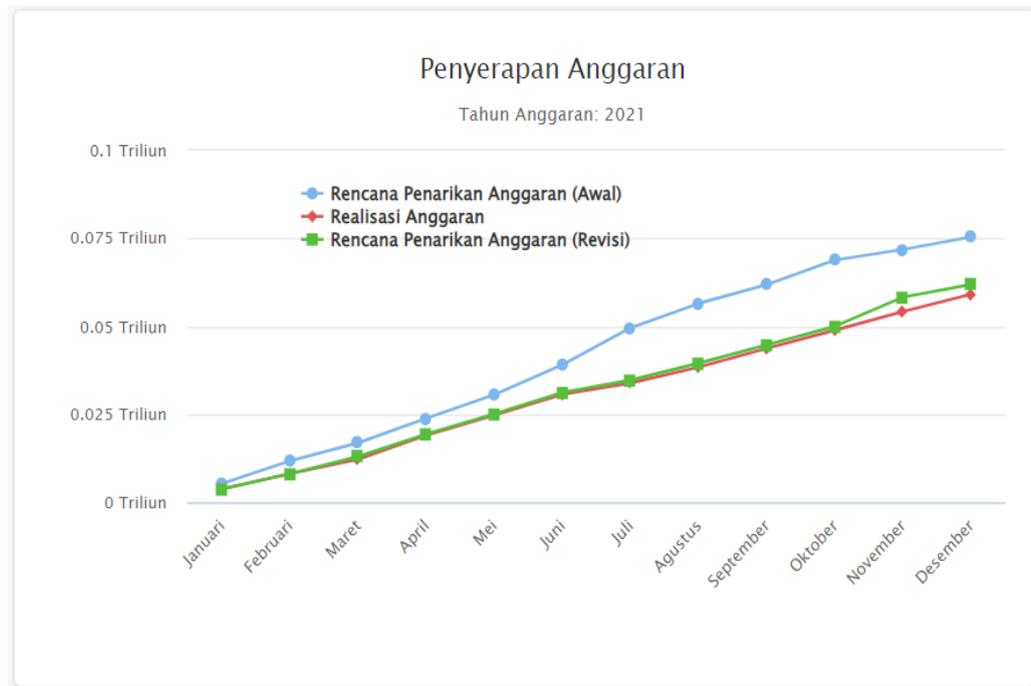
SMART | KEMENKUU

smart.kemkenku.go.id/app2021/unit/form_iop_rain/V0E=/MTM=

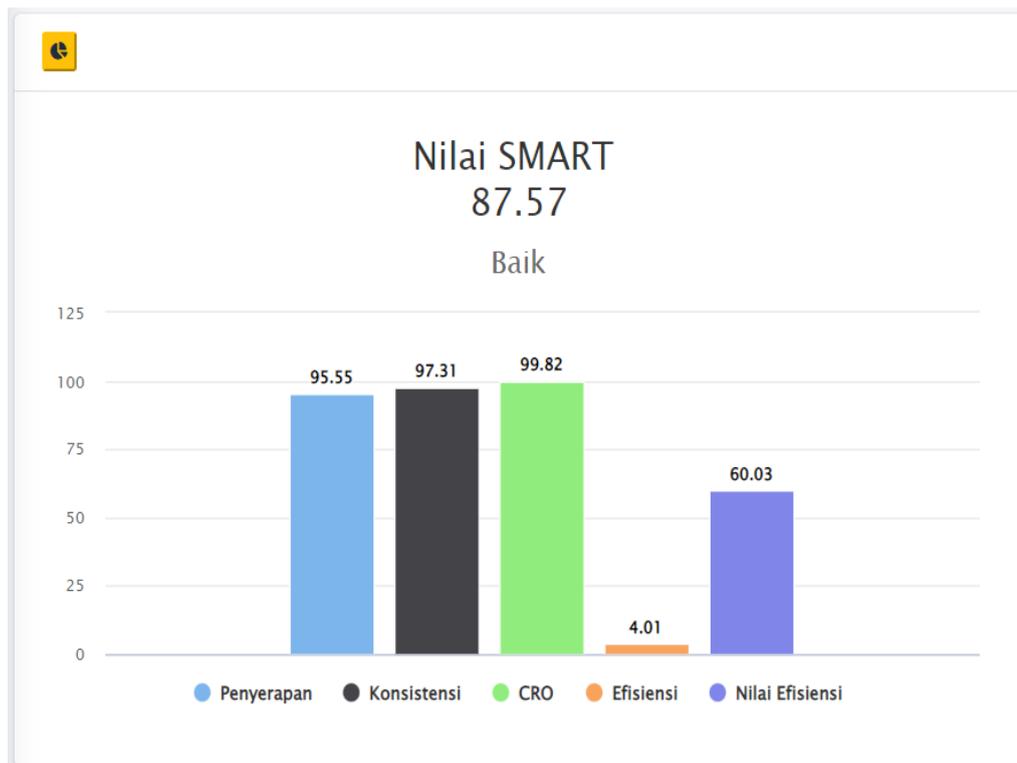
Rekap **Triwulan I** **Triwulan II** **Triwulan III** **Triwulan IV**

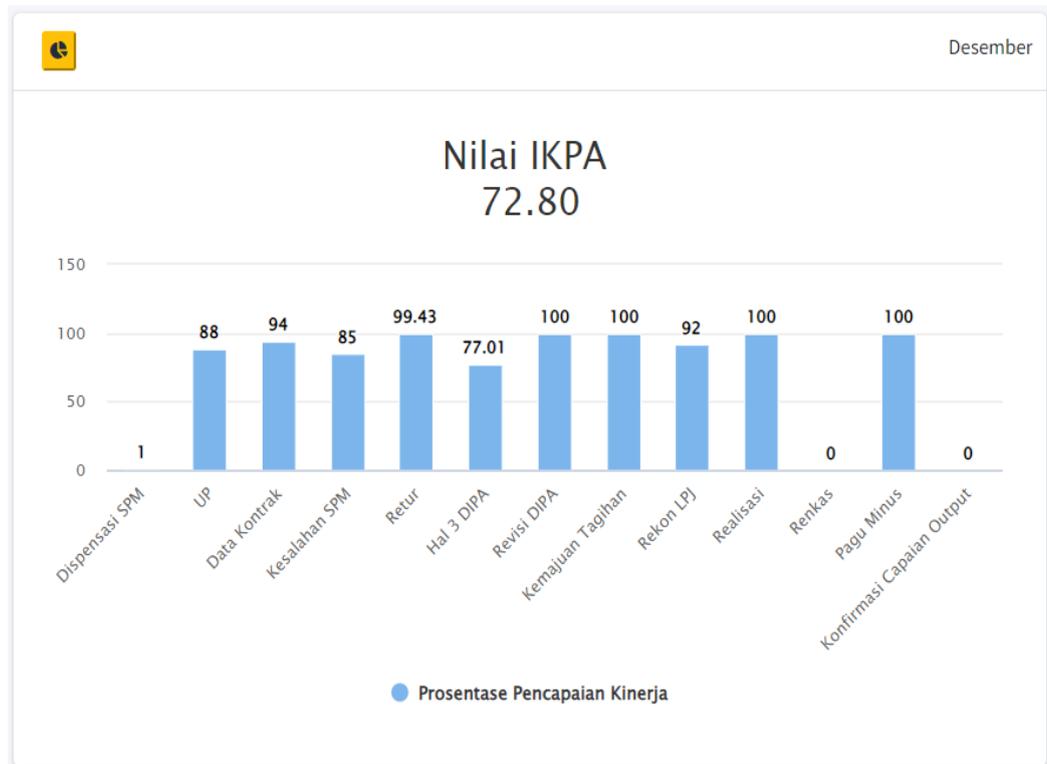
No.	Periode	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Output Program (%)	Keterangan
1	Rekap	03 Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM	02 Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Inspektorat Jenderal (Indeks)	76,61	103,33	<p>Triwulan I : persiapan untuk melakukan survei kepuasan layanan internal tgen melalui survei indeks layanan internal/kesekretariatan</p> <p>Triwulan II : persiapan untuk melakukan survei kepuasan layanan internal tgen melalui survei indeks layanan internal/kesekretariatan dan koordinasi dengan roren untuk survei nya apakah akan difasilitasi roren atau masing2 per unit eselon I</p> <p>Triwulan III :Inspektorat. Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan layanan manajemen internal sampai dengan Bulan September 2021</p> <p>Triwulan IV : Inspektorat. Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan layanan manajemen internal sampai dengan Bulan September 2021. Pada Bulan Desember 2021 dilaksanakan kegiatan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat. Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan hasil Capaian Indeks sebesar 79,01 dari skala 100. Sehingga capaian atas indikator telah melampaui target yaitu 76,61.</p>
2	Rekap	04 Pengawasan Internal dalam Rangka Mewujudkan Satuan Kerja WBK/WBBM guna Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	01 Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM berdasar penilaian KEMENPAN RB (lolos seleksi oleh KEMENPAN RB) (Satuan Kerja)	54	103,85	<p>Triwulan I : Telah terlaksana kegiatan persiapan pelaksanaan evaluasi WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham oleh Inspektorat Jenderal selaku TPI</p> <p>Triwulan II : Telah terlaksana kegiatan desk evaluasi atas 755 Satuan kerja di lingkungan kemenkumham serta pelaksanaan Panel TPI yang mengusulkan 476 Satker menuju WBK/WBBM pada Triwulan II untuk selanjutnya pada Triwulan III akan dilaksanakan kegiatan Penguatan dan Pendampingan oleh TPI terhadap Satker usulan.</p> <p>Triwulan III :Pada Triwulan III TA. 2021 Telah disusun SK Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07 OT.03.01 tentang perubahan atas SK Menteri penetapan usulan satker berpredikat WBK/WBBM tanggal 19 Agustus 2021 menjadi 75 Satker menuju WBBM dan 402 Satker menuju WBK. Selain itu Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan dalam rangka pembangunan Zi berupa pelaksanaan pemantauan dan penguatan Satuan Kerja usulan WBK/WBBM.</p> <p>Triwulan IV : Berdasarkan hasil evaluasi TPN Permenpan RB yang diumumkan pada tanggal 20 Desember 2021, dengan usulan Inspektorat. Jenderal selaku TPI sejumlah 477 Satker di lingkungan Kemenkumham, diperoleh hasil sebanyak 55 Satuan Kerja berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM pada Tahun Anggaran 2021. Sehingga capaian atas Satker telah melampaui target sebesar 54 Satker.</p>





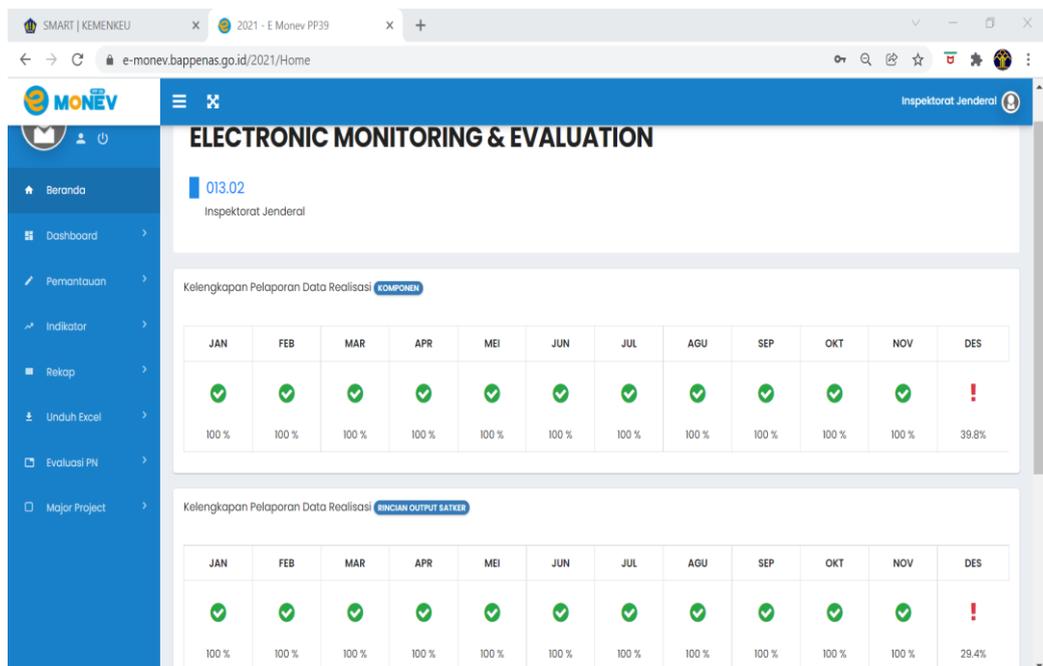
Adapun perolehan nilai pada level Satker adalah sebagai berikut:

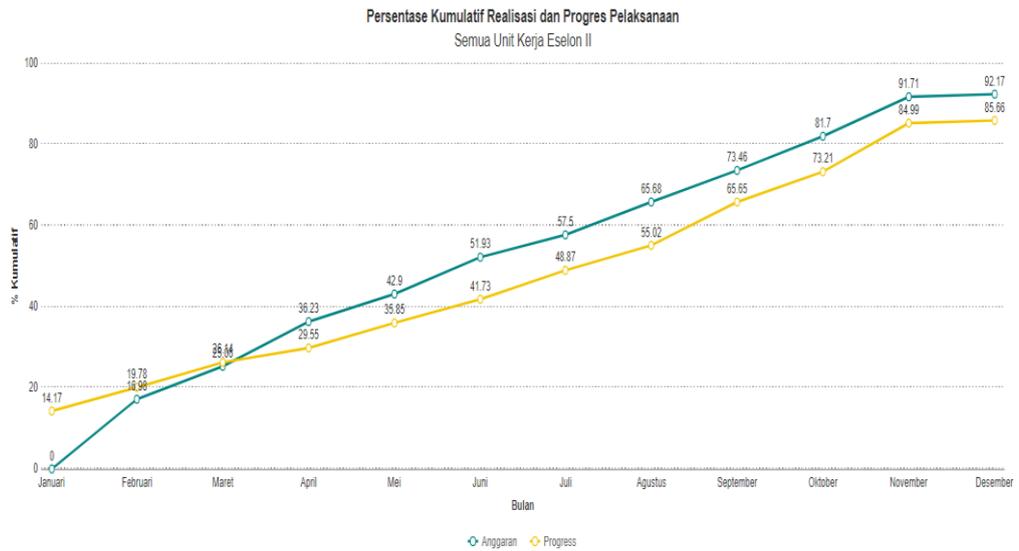




b) Monitoring pada e-Monev

Monitoring dilaksanakan dengan melakukan penginputan pada Electronic Monitoring & Evaluation Kementerian PPN/Bappenas di laman <https://e-monev.bappenas.go.id/2021/home> yang dilaksanakan pada layer Unit dan Satker.





c) Monitoring pada e-Performance

Hai **Jhoni Ginting**, Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Senin, 27 Desember 2021 | 08:15:12 WIB

Home

TAHUN: 2021 | Tabulasi Pengukuran Kinerja | INSPEKTORAT JENDERAL | [Tampilkan](#)

ID	NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPAI (<100%)					TERCAPAI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				00.00 s/d 49.99	50.00 s/d 64.99	65.00 s/d 74.99	75.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99			
12	INSPEKTORAT JENDERAL	TW1	6								6
		TW2	5						1		6
		TW3	6								6
		TW4	1	5				5			6
1210	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	TW1	11						1		12
		TW2	11						1		12
		TW3	9						1	2	12

BAB III CAPAIAN KINERJA

I. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA/ PERJANJIAN KINERJA

A. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama/ Perjanjian Kinerja Eselon I



1) Laporan Keuangan Kemenkumham

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satu Sasaran Strategis Program Inspektorat Jenderal Tahun 2021 adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Opini Audit Eksternal atas laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Kemenkumham Tahun 2020 Nomor: 23/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target.

2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenkumham

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI diubah menjadi Peraturan

Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2013 Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh nilai Maturitas Penerapan SPIP sebesar 3,609 atau Terdefinisi yaitu telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) mengeluarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang mengubah Metode Penilaian Maturitas SPIP sebelumnya, sehingga Nilai Maturitas SPIP 2021 Kemenkumham masih dalam proses penjaminan kualitas dan belum dapat disajikan.



3) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien maka diperlukan adanya penguatan akuntabilitas kinerja pada Instansi Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: ITJ.6.PW.03.01-59/VI/2021, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Evaluasi atas Implementasi

SAKIP pada 11 unit utama Kementerian Hukum dan HAM dengan Nilai Hasil Evaluasi sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran	Jml	Predikat
1.	SETJEN	24,13	16,77	11,62	8,56	14,50	75,59	BB
2.	ITJEN	25,45	22,50	12,78	7,00	15,22	82,94	A
3.	DITJEN IMIGRASI	23,51	21,88	10,55	7,75	16,44	80,12	A
4.	DITJEN AHU	25,32	20,10	10,82	7,75	16,38	80,37	A
5.	DITJEN PP	25,10	20,21	12,46	7,75	14,94	80,46	A
6.	DITEN KI	22,79	22,08	13,00	8,00	15,33	81,21	A
7.	DITJEN PAS	25,01	20,10	11,90	7,75	15,63	80,39	A
8.	DITJEN HAM	24,89	20,10	10,90	7,75	17,00	80,64	A
9.	BPHN	24,30	19,17	12,73	7,25	15,44	78,88	BB
10.	BPSDM	26,59	19,17	10,72	7,00	14,51	77,99	BB
11.	BALITBANG KUMHAM	25,44	21,56	13,62	6,63	16,00	83,25	A

Nilai capaian target Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja (11 Unit Eselon-1) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mencapai 100% melebihi dari target yaitu 92%

4) Capaian Reformasi Birokrasi (RB)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menegaskan akan pentingnya penerapan clean government dan good governance secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan 8 Area Perubahan.

Dalam mewujudkan birokrasi yang berbasis kinerja, Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mengacu pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya dan diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya dengan proses monitoring dan evaluasi secara internal dan eksternal.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: ITJ.3.PW.03.01-551/IV/2021 tanggal 19 April dengan menggunakan penilaian konversi seluruh Satuan Kerja

Eselon I, Kementerian Hukum dan HAM berhasil memperoleh nilai PMPRB minimal 90.



5) Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dalam rangka memperoleh Predikat WBK/WBBM Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal (TPI) mempunyai tugas melakukan penilaian Satuan Kerja usulan dengan melakukan evaluasi pada dua komponen, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yang selanjutnya hasil evaluasi tersebut diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk dilakukan penilaian lanjut.

Pada tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 477 Satuan Kerja untuk memperoleh Predikat Satuan Kerja WBK/WBBM kepada TPN sesuai dengan Surat Usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.07.OT.03.01-01 tanggal 19 Agustus 2021. Hasil Penilaian oleh TPN diumumkan pada Hari Anti Korupsi, bahwa 55 Satker memperoleh predikat WBK/WBBM.

6) Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM

Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM didasarkan pada Nilai rata-rata Indeks Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI). PMPI terdiri dari survei internal, eksternal dan penilaian lapangan dan penilaian faktor kalibrasi. Hasil akhir Pelaksanaan PMPI Tahun 2021 memperoleh hasil penilaian/indeks

rata-rata (Indeks Persepsi Integritas) sebesar 91,82 dari indeks PMPI internal sebesar 88,89 dan indeks PMPI eksternal sebesar 94,75. Terjadi kenaikan pada rata-rata indeks dari Tahun 2020 (91,36) sebesar 0,46 dan indikator terendah yaitu Sistem Anti Korupsi dan Budaya Integritas Organisasi.

B. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan/ Perjanjian Kinerja Eselon II

1) Capaian Indikator Kegiatan pada Inspektorat Wilayah I

Kegiatan tersebut dicapai dengan penetapan beberapa indikator kinerja kegiatan dengan nilai target capaian pengawasan per output/IKK sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .	Level IACM/Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	Level 3 (Integrated)	Tercapai
	Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I	52%	95,83%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara di lingkungan kerja ITWIL I	62%	72%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I	82%	95,36%	Tercapai
		Persentase peningkatan	22%	76,28%	Tercapai

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
		pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait kerugian negara di lingkungan kerja ITWIL I			
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I	78%	100%	Tercapai
		Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL I	6%	2%	Tidak Tercapai

- a) Target yang ditetapkan dalam menjaga level IACM/Kapabilitas Inspektorat Jenderal sebagai APIP adalah pada level 3 (Integrated) dan dalam tahun 2021 capaiannya tetap pada level 3 (Integrated) atau 100%. Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal dan di QA oleh BPKP.
- b) Capaian kinerja pemanfaatan penerapan manajemen risiko di pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja adalah 138 dari 144 satuan kerja atau 95,83% melampaui dari target yang ditetapkan 52%. Hasil dalam pendampingan penerapan manajemen risiko pada satuan kerja dapat dilihat dari meningkatnya Maturitas SPIP, nilai PMPRB dan Usulan WBK/WBBM, PMPRB yang dalam parameteranya memberikan persyaratan ketersediaan data dukung penerapan manajemen risiko dan implementasinya pada satuan kerja
- c) Capaian Kinerja TL Rekomendasi APIP terkait Pengembalian ke Kas Negara adalah 72%. Temuan/rekomendasi hasil audit Inspektorat Wilayah I pertanggal 21 Desember 2021 atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan sampai dengan 21 Desember 2021 berjumlah

Rp2.636.912.591,56. Tindak lanjut oleh satuan kerja atas rekomendasi sampai dengan 21 Desember 2021 berjumlah Rp1.898.496.928,21, sehingga masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu Rp738.415.663,35.

$$\text{Capaian Kinerja TL} = \frac{\text{Jumlah yang di TL}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\% = \frac{\text{Rp1.898.496.928,21}}{\text{Rp2.636.912.591,56}} \times 100\% = 72\%$$

- d) Capaian Kinerja TL Rekomendasi APIP terkait administrasi adalah 95,36%. Temuan/rekomendasi hasil audit Inspektorat Wilayah I pertanggal 21 Desember 2021 atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan sampai dengan 21 Desember 2021 berjumlah 992 temuan. Tindak lanjut oleh satuan kerja atas rekomendasi sampai dengan 21 Desember 2021 berjumlah 946 temuan, sehingga masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu sejumlah 46 temuan.

$$\text{Capaian Kinerja TL} = \frac{\text{Jumlah yang di TL}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\% = \frac{946 \text{ temuan}}{992 \text{ temuan}} \times 100\% = 95,36\%$$

- e) Capaian Kinerja TL Rekomendasi BPK terkait Pengembalian ke Kas Negara adalah 76,28%. Temuan/rekomendasi hasil audit BPK pertanggal 21 Desember 2021 atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan sampai dengan 21 Desember 2021 berjumlah Rp170.700.477,00. Tindak lanjut oleh satuan kerja atas rekomendasi sampai 21 Desember 2021 berjumlah Rp130.211.477,00, sehingga masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu sejumlah Rp40.489.000,00.
- f) Capaian Kinerja TL Rekomendasi BPK terkait Administrasi adalah 100%. Temuan/rekomendasi hasil audit BPK pertanggal 21 Desember 2021 atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan sampai dengan 21 Desember 2021 berjumlah 7 temuan administrasi. Tindak lanjut oleh satuan kerja atas rekomendasi sampai dengan 21 Desember 2021 berjumlah 7 temuan, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti/ semua rekomendasi telah ditindaklanjuti hingga tuntas.
- g) Capaian kinerja atas jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 adalah sekitar 2% Satuan Kerja Inspektorat Wilayah I yang diusulkan oleh satuan kerja untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM berjumlah 114 satker. Setelah dilakukan

evaluasi oleh Inspektorat Wilayah I selaku Tim TPI satuan kerja yang dinyatakan “Lulus” dan dapat direkomendasikan untuk dilakukan penilaian oleh Menpan RB selaku Tim TPN berjumlah 54 satuan kerja. Penilaian dilakukan oleh TPN melalui metode desk evaluasi via zoom dan verifikasi lapangan. Berdasarkan penilaian tersebut, diperoleh 3 satker di bawah wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah I yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.

2) Capaian Indikator Kegiatan pada Inspektorat Wilayah II

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .	Level IACM/Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	Level 3 (Integrated)	Tercapai
	Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II	52%	65,77%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara di lingkungan kerja ITWIL II	62%	99,04%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II	82%	72,58%	Tidak Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak	22%	91,3%	Tercapai

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
		lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait kerugian negara di lingkungan kerja ITWIL II			
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II	78%	78,46%	Tercapai
		Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL II	6%	10,16%	Tercapai

a) Target yang ditetapkan dalam menjaga level IACM/Kapabilitas Inspektorat Jenderal sebagai APIP adalah pada level 3 (Integrated) dan dalam tahun 2021 capaiannya tetap pada level 3 (Integrated) atau 100%. Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal dan di QA oleh BPKP.

b) Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL II.

$$= \frac{98}{149} \times 100\%$$

$$= 65,77\%$$

c) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Itwil II realisasinya sebesar Rp1.782.603.133,13 / Rp1.799.789.377,70 x100%=99,04% tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terkait pengembalian ke kas negara.

d) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Itwil II,

realisasinya sebesar $646/890 \times 100\% = 72,58\%$ tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terkait administrasi.

- e) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Itwil II, realisasinya sebesar $\text{Rp}24.891.189.503,78 / \text{Rp}27.240.872.857,83 \times 100\% = 91,3\%$.
- f) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Itwil II realisasinya sebesar $164/209 \times 100\% = 78,46\%$ tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terkait administrasi.
- g) Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM yaitu 12 Satker lolos WBK/WBBM dari total 118 Satker yang diusulkan.

$$= \frac{12}{118} \times 100\%$$

$$= 10,16$$

3) Capaian Indikator Kegiatan pada Inspektorat Wilayah III

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .	Level IACM/Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	Level 3 (Integrated)	Tercapai
	Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III	52%	56,25%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara di lingkungan kerja ITWIL III	62%	86,18%	Tercapai

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III	82%	89,84%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait kerugian negara di lingkungan kerja ITWIL III	22%	90,84%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III	78%	80,00%	Tercapai
		Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL III	6%	8,45%	Tercapai

- a) Target yang ditetapkan dalam menjaga level IACM/Kapabilitas Inspektorat Jenderal sebagai APIP adalah pada level 3 (Integrated) dan dalam tahun 2021 capaiannya tetap pada level 3 (Integrated) atau 100%. Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal dan di QA oleh BPKP.
- b) Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan Itwil III bahwa terdapat 81 satuan kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko dari total 144 satuan kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah III, terdiri dari 24 satuan kerja yang telah dilakukan Pendampingan Manajemen Risiko dan 57 satuan kerja yang telah

mendapatkan predikat WBK/WBBM dimana 57 satuan kerja tersebut telah menyusun dokumen Manajemen Risiko meskipun belum sepenuhnya mengacu pada Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018.

- c) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Itwil III terdapat *progress* tindak lanjut sebesar Rp9.409.351.642,53 dari total rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negara dengan nilai sebesar Rp10.917.407.824,00.
- d) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Itwil III, terdapat *progress* tindak lanjut sebanyak 937 rekomendasi dari total 1043 rekomendasi terkait administrasi.
- e) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan *Eksternal* Terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Itwil III, bahwa total sebesar Rp12.681.226.679,53 dengan total tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi sebesar Rp11.519.167.962,30.
- f) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan *Eksternal* Terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Itwil III sebanyak 205 dengan total tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi sebesar 164.
- g) Persentase Satuan *Kerja* di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK/WBBM yaitu terdapat 6 dari 71 Satuan Kerja yang memperoleh Predikat Menuju WBK / WBBM pada satuan kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah III

4) Capaian Indikator Kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .	Level IACM/Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	Level 3 Integrated	Tercapai
	Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di	52%	66,17%	Tercapai

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
	dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	lingkungan kerja ITWIL IV			
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara di lingkungan kerja ITWIL IV	8%	8,63%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV	82%	85,42%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait kerugian negara di lingkungan kerja ITWIL IV	22%	22,41%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV	33%	45,28%	Tercapai
		Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL IV	6%	13,64%	Tercapai

- a) Pada Capaian IKK Level IACM/Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, berada pada level 3. Hal ini berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SP-214/D2/02/2019 tanggal 10 November 2019 serta Simpulan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP Kemenkumham 2019.
- b) Pada Capaian IKK Pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV, diperoleh persentase 66,17% dengan target 52%. Sebanyak 88 satuan kerja dari 133 satuan kerja.
- c) Pada Capaian IKK Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internail terkait kerugian Negara di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah IV, diperoleh persentase 8,65% dengan target 8% atau sebesar Rp442.744.705,75 dari total rekomendasi sebesar Rp5.113.501.217,81 sejak tahun 2014.
- d) Pada Capaian IKK Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internail terkait administrasi di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah IV, diperoleh persentase 82.15% dengan target 82%. Terdapat tindak lanjut sebanyak 221 rekomendasi dari total 269 rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi sejak tahun 2014.
- e) Pada Capaian IKK Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait kerugian negara di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah IV, diperoleh persentase 45,1% dengan target 22% atau sebesar Rp5.996.786.512 dari total rekomendasi sebesar Rp13.302.215.011 sejak tahun 2011.
- f) Pada Capaian IKK Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah IV, diperoleh persentase 85,25% dengan target 33% atau sebanyak 61 rekomendasi dari total 52 rekomendasi.
- g) Pada Capaian IKK Persentase satuan kerja di lingkungan Itwil IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM, diperoleh persentase 13,64% dengan target 6% atau sebanyak 9 satuan kerja dari jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPI sebanyak 66 satuan kerja.

5) Capaian Indikator Kegiatan pada Inspektorat Wilayah V

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .	Level IACM/Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	Level 3 (Integrated)	Tercapai
	Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V	52%	65%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara di lingkungan kerja ITWIL V	60%	31,05%	Tidak Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V	82%	99,16%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait kerugian negara di lingkungan kerja ITWIL V	22%	83,41%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	78%	97,55%	Tercapai

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
		eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V			
		Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL V	6%	9,78%	Tercapai

- a) Target yang ditetapkan dalam menjaga level IACM/Kapabilitas Inspektorat Jenderal sebagai APIP adalah pada level 3 (Integrated) dan dalam tahun 2021 capaiannya tetap pada level 3 (Integrated) atau 100%. Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal dan di QA oleh BPKP.
- b) Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL V.
- c) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Itwil V tidak tercapai dikarenakan Itwil V belum mendapatkan bukti penyeteroran ke kas negara atas PNBK pada hasil pemeriksaan DJKI.
- d) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Itwil V sebesar 99,16%
- e) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Itwil V sebesar 83,41%. Sampai dengan saat ini Inspektorat Jenderal telah menyurati dan melakukan diskusi konsinyering antara DJKI dan BPK untuk proses penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan.
- f) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Itwil V realisasinya sebesar 97,55%.
- g) Persentase Satuan Kerja di lingkungan Itwil V yang mendapatkan predikat WBK/WBBM yaitu tercapai sebesar 9,78% atau 9 dari 92 Satker.

6) Capaian Indikator Kegiatan pada Inspektorat Wilayah VI

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .	Level IACM/Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	Level 3 (Integrated)	Tercapai
	Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI	52%	69,79%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara di lingkungan kerja ITWIL VI	62%	79,53%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI	82%	85,93%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal terkait kerugian negara di lingkungan kerja ITWIL VI	22%	97,87%	Tercapai
		Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	78%	93,67%	Tercapai

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	CAPAIAN	Ket
		eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI			
		Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL VI	6%	18,75%	Tercapai

a) Target yang ditetapkan dalam menjaga level IACM/Kapabilitas Inspektorat Jenderal sebagai APIP adalah pada level 3 (Integrated) dan dalam tahun 2021 capaiannya tetap pada level 3 (Integrated) atau 100%. Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal dan di QA oleh BPKP.

b) Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL VI

$$= \frac{104}{149} \times 100\% = 69,79\%$$

c) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%

$$= \frac{Rp. 1.736.494.570,02}{Rp. 2.183.476.291,02} \times 100\% = 79,53\%$$

d) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

$$= \frac{666}{775} \times 100\% = 85,93\%$$

e) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi eksternal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%

$$= \frac{Rp. 205.335.176.920,87}{Rp. 209.797.428.207,64} \times 100\% = 97,87\%$$

- f) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi eksternal dikali 100%

$$= \frac{207}{222} \times 100\% = 93,67\%$$

- g) Pada persentase Satuan Kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM, bahwa 80 Satuan Kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN), sebanyak 15 Satuan Kerja yang berhasil mendapat Predikat Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

7) Capaian Indikator Kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

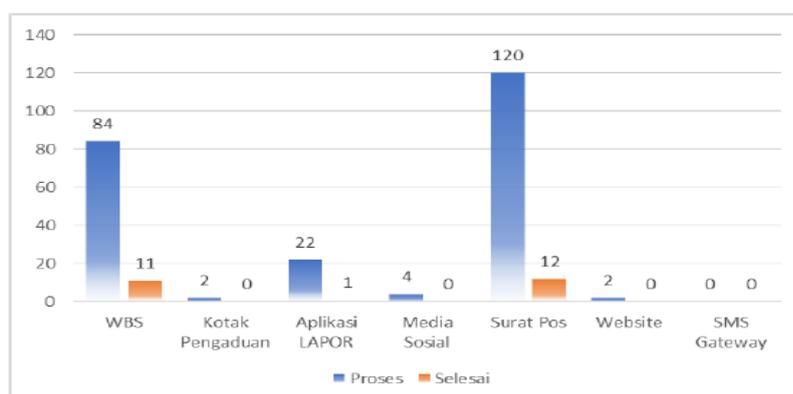
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA/PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
SK-13: Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah rekomendasi pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi (100%)
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	66,00	91,82 (139,12%)
SK-14: Mengoptimalkan efektifitas penyelenggaraan tata Kelola organisasi dan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB Itjen	14,17	38,48 (271,55%)
	Nilai SAKIP Itjen "Baik"	82,88	82,94 (100,07%)
	Nilai Maturitas SPIP Itjen	Level 3	Level 4 (133,33%)
SK-15: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang berkualitas, berintegritas, dan profesional	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	82%	100% (121,95%)
	Tingkat internalisasi pegawai Itjen atas Tata Nilai Kemenkumham	3	4 (133,33%)
SK-16 Mengembangkan kualitas sistem informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase pemenuhan pengembangan teknologi informasi yang menunjang proses bisnis bidang pengawasan/ pengendalian internal	82%	85,71% (104,52%)
SK-17: Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Persentase realisasi layanan perkantoran yang akuntabel	85%	97,88% (115,15%)
	Jumlah layanan fasilitas kerumahtanggaan, BMN, dan sarpras internal	12	12 (100%)

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA/PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
SK-18: Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan akuntabel	Laporan keuangan Itjen yang akuntabel	WTP	WTP (100%)
	Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Itjen	90%	98,71% (109,67%)
	Persentase fasilitasi pengelolaan tindak lanjut rekomendasi penyusunan RKA-KL Itjen	95%	100% (105,26%)

- a) Terimplementasinya kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) tercapai 1 Rekomendasi. Berdasarkan laporan Nomor ITJ.UM.01.01-4673 hal Laporan Kompilasi UPP Kementerian Hukum dan HAM bahwa tim UPP telah melakukan pendampingan/ consulting pencegahan praktek Pungli dan Survei Pengaduan di beberapa Kanwil. Direkomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM selalu menekankan agar ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bekerja dengan integritas yang tinggi sehingga kedepannya seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bebas dari pungutan liar.
- b) Rekapitulasi Jumlah Pengaduan (sms, email, call center, surat, dan langsung)

No	Kanal	Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Oct	Nov	Des	Jumlah
1	WBS	5	16	7	10	7	5	4	6	21	13	1	0	95
2	Kotak Pengaduan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
3	Aplikasi LAPOR	1	1	2	4	3	0	3	0	1	0	8	0	23
4	Media Sosial	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
5	Surat Pos	15	17	7	7	7	0	1	11	19	23	23	2	132
6	Website	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
7	SMS Gateway	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Jumlah	22	34	16	21	17	5	8	19	42	38	34	2	258

c) Tindak lanjut penanganan laporan pengaduan sebagai berikut:



No	Status Pengaduan	WBS	Kotak Pengaduan	Aplikasi LAPOR	Media Sosial	Surat Pos	Website	SMS Gateway	Total
#	Proses	84	2	22	4	120	2	0	234
1	Pending	0	0	0	0	1	0	0	1
2	Proses Disposisi	19	0	4	0	58	0	0	81
3	Sudah Diklarifikasi	16	2	9	3	17	1	0	48
4	Proses Telaah Irwil	34	0	5	0	23	0	0	62
5	Proses Unit Utama/Kanwil	15	0	4	1	21	1	0	42
#	Selesai	11	0	1	0	12	0	0	24
1	Terbukti	1	0	0	0	1	0	0	2
2	Tidak Terbukti	5	0	1	0	0	0	0	6
3	Bukan Kewenangan Kemenkumham	5	0	0	0	11	0	0	16
	Total	95	2	23	4	132	2	0	258

d) Jenis pelanggaran dan tindak lanjut dari pengaduan

No	Jenis Pelanggaran	Pending	Proses Disposisi	Sudah Diklarifikasi	Proses Telaah Irwil	Proses Unit Utama/Kanwil	Terbukti	Tidak Terbukti	Bukan Kewenangan Kumham	Total
1	Pelanggaran Disiplin Pegawai	1	13	5	5	0	2	1	8	35
2	Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/Penganiayaan	0	22	15	9	1	1	2	8	58
3	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	9	5	6	0	2	1	1	24
4	Korupsi	0	2	0	0	0	1	1	1	5
5	Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA	0	2	5	1	0	0	0	1	9
6	Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen	0	3	4	4	0	0	0	4	15
7	Narkoba	0	7	4	0	1	0	0	1	13
8	Pelayanan Publik	0	2	5	6	0	0	3	4	20
9	Laporan dan Klarifikasi	0	21	19	11	0	0	8	20	79
	Total	1	81	62	42	2	6	16	48	258

- e) Untuk Indeks RB, Inspektorat Jenderal mendapatkan nilai total pengungkit 34,92 dan total hasil 3,56 sehingga nilai total Inspektorat Jenderal sebesar 38,48.
- f) Untuk Nilai SAKIP Itjen, berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, Inspektorat Jenderal memperoleh jumlah 82,94 dengan predikat A.
- g) Pada nilai Maturitas SPIP, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 4,4 dengan tingkat maturitas pada Level 5 (Optimum) menunjukkan bahwa telah diterapkannya pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- h) Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi sudah mencapai 100%. Bahwa selama Tahun 2021 telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui diklat, pelatihan, FGD dan kegiatan GEMAR BELAJAR. Terhusus untuk kegiatan GEMAR BELAJAR diikuti oleh seluruh pegawai.
- i) Tingkat internalisasi pegawai Itjen atas Tata Nilai Kemenkumham telah tercapai, bahwa internalisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain melalui kegiatan internalisasi Tata Nilai PASTI dan penguatan budaya pelayanan Prima, Kultum, Revolusi Mental, Pelaksanaan GEMAR BELAJAR dan lain sebagainya. Untuk mengukur tingkat tata nilai integritas dilingkungan Itjen, dilakukan survei secara online dengan mengukur 5 indikator yaitu:
- Professional memperoleh indeks 4,29;
 - Akuntabel memperoleh indeks 4,31;
 - Sinergi memperoleh indeks 4,32;
 - Transparan memperoleh indeks 4,32; dan
 - Inovatif memperoleh indeks 4,27.

Nilai akhir survei internalisasi memperoleh nilai 4,30 dari skala 5.

No	Unit Kerja	Kode	Total Responden	PROFESIONAL	AKUNTABEL	SINERGI	TRANSPARAN	INOVATIF	NILAI AKHIR
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
1	Inspektorat Wilayah	A1	124	1.601	1.612	1.619	1.085	1.602	7.519
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	A2	38	486	483	480	316	473	2.238
JUMLAH TOTAL :			162	2.087,00	2.095,00	2.099,00	1.401,00	2.075,00	9.757,00
NILAI RATA-RATA :				695,67	698,33	699,67	700,50	691,67	696,93
NILAI SURVEI SKALA 5 :				4,29	4,31	4,32	4,32	4,27	4,30
NILAI SURVEI SKALA 100 :				85,88	86,21	86,38	86,48	85,39	86,04

- j) Bahwa terkait persentase pemenuhan pengembangan teknologi informasi yang menunjang proses bisnis, telah dilaksanakan pemenuhan pengembangan TI yang menunjang pengawasan yaitu SIPIDU, website, UPG, WBS, LHKASN, e-Office dan e-MAWAS. Bahwa dari 6 (enam)

kebutuhan teknologi informasi tersebut, selama Tahun 2021 sudah terpenuhi tetapi masih kurang 1 (satu) yaitu E-MAWAS. Pada aplikasi tersebut terdapat 8 modul yang mana saat ini baru selesai 3 modul dan 5 modul berikutnya akan diselesaikan Tahun 2022.

- k) Persentase realisasi layanan perkantoran yang akuntabel, bahwa nilai realisasi selama Tahun 2021 sebesar 97,88%.
- l) Bahwa jumlah layanan fasilitas kerumahtanggaan, BMN, dan sarpras internal telah terlaksana selama 12 bulan layanan.
- m) Laporan keuangan Inspektorat Jenderal yang akuntabel tercapai memperoleh WTP, bahwa BPK telah melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 dan Inspektorat Jenderal kembali mendapatkan predikat WTP.
- n) Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal terealisasi sebesar 98,71% atau sebesar Rp61.044.391.730.
- o) Untuk fasilitasi pengelolaan tindak lanjut penyusunan RKA-KL sudah dilakukan pengesahan dan DIPA sudah terbit.

8) CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH DAN KEGIATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Kegiatan pengawasan yang diklasifikasikan sesuai jenis-jenis kegiatan pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari kegiatan pengawasan Audit, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Evaluasi, Reviu, Monitoring, Pendampingan, dan Pengawasan Lainnya sebagaimana berikut:

No.	Kegiatan	Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III	Inspektorat Wilayah IV	Inspektorat Wilayah V	Inspektorat Wilayah VI
1	Audit	17	34	27	23	18	24
2	Pemeriksaan Khusus		8		6	6	9
3	Koordinasi Pimpinan			9	10		7
4	Reviu	29	31	15	27	28	24
5	Evaluasi	22	18	13	12	20	16
6	Audit Tujuan Tertentu	19		10	2		1
7	Pendampingan	15	22	21	13		33
8	Monitoring	7	48	17	8	11	1
9	Kegiatan Lainnya	30	40	11	16	46	17
Total		139	201	123	117	129	132

1) Audit

Pada Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan audit berupa :

- a. Audit Barang dan Jasa;
- b. Audit Pengelolaan Keuangan;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. Audit Tugas dan Fungsi Masyarakat;
- f. Audit Investigatif;
- g. Audit Tujuan Tertentu; dan
- h. Audit Pengadaan dan Pengelolaan BAMA.

2) Reviu

Pada Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan reviu diantaranya Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-KL dan Revisi Anggaran, Reviu LKBMN, Reviu LAKIP dan Reviu Tunas Integritas.

3) Evaluasi

Telah dilaksanakan evaluasi SAKIP, Maturitas SPIP, Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, serta evaluasi PMPRB terhadap 11 unit Eselon 1

4) Pendampingan

Pendampingan merupakan serangkaian kegiatan membandingkan rencana pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari pendampingan adalah membantu unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mewujudkan sasaran dan tujuan unit kerjanya secara efektif dan efisien. Pendampingan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 diantaranya yaitu:

Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Unit Kerja/ Satker telah melakukan pengendalian pengelolaan anggaran termasuk memonitor terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pelaksanaan pendampingan pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I, Inspektorat IV dan Inspektorat Wilayah VI sebagai berikut:

No	Inspektorat Wilayah	Kanwil	Surat Tugas	Laporan
1.	Inspektorat Wilayah I	a. Inspektorat Jenderal 1) Inspektorat Jenderal 2) Inspektorat Jenderal b. Balitbang 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	a. Inspektorat Jenderal 1) ITJ.KP.04.01.1-71 Tgl 17 Juni 2021 2) ITJ.KP.04.01.1-115 Tgl 6 Oktober 2021 b. Balitbang 1) ITJ.KP.04.01.1-71 Tgl 17 Juni 2021	a. Inspektorat Jenderal 1) ITJ.2.PW.03.01-46/VII/2021 Tgl 2 Juli 2021 2) ITJ.2.PW.03.01-89/VI/2021 Tgl 17 Juni 2021 b. Balitbang 1) ITJ.2.PW.03.01-46/VII/2021 Tgl 2 Juli 2021
4.	Inspektorat Wilayah IV	a. Kanwil Sulawesi Barat 1) Kantor Wilayah Sulawesi Barat b. Kanwil Bali 1) Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar	a. Kanwil Sulawesi Barat 1) ITJ.KP.04.01.4-111 Tgl 26 November 2021 b. Kanwil Bali 1) ITJ.KP.04.01.4-112 Tgl 26 November 2021	a. Kanwil Sulawesi Barat 1) – b. Kanwil Bali 1) –
6.	Inspektorat Wilayah VI	a. BPSDM Hukum dan HAM 1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	a. BPSDM Hukum dan HAM 1) ITJ.KP.04.01.6-124 Tgl 12 September 2021	a. BPSDM Hukum dan HAM 1) ITJ.7.PW.03.01-96/XI/2021 Tgl 24 November 2021

a. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai konsistensi pencantuman sasaran kinerja, kesesuaian total pagu, kesesuaian sumber dana dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan RKAKL yang berkualitas serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance. Ruang lingkup Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan meliputi pengujian terbatas terhadap RKA-K/L dan atas kelengkapan/ kebenaran dokumen pendukung antara lain RKA satuan kerja, TOR, RAB dan lain-lain serta kepatuhan terhadap kaidah – kaidah perencanaan penganggaran yang dipersyaratkan dalam penerapan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19
- c. Pendampingan Penerapan MR pada Kanwil
- d. Pendampingan Reviu Usulan Anggaran
- e. Pendampingan Satker dalam rangka evaluasi WBK/WBBM
- f. Pendampingan tes Penerimaan Calon Taruna/ Taruni
- g. Pendampingan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

5) Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan evaluasi selama Tahun 2021 diantaranya meliputi :

- a. Evaluasi atas Implementasi SAKIP
- b. Evaluasi Implementasi Capaian Reformasi Birokrasi
- c. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- d. Evaluasi dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

6) Pemantauan/ Monitoring

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, “pemantauan” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selama tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa pemantauan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP dan Ombudsman pada Satuan Kerja baik pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, maupun UPT.

7) Pengawasan Lainnya

Selama Tahun 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan kegiatan pengawasan lainnya, antara lain :

- a. Konsinyering PMPRB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021
- b. FGD panel
- c. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Arsip Substantif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- e. Mengikuti Kegiatan Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan Barang Milk Negara (BMN) pada Kementerian Hukum dan HAM

8) Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

- a. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, meliputi :
Revisi Anggaran level DJA Kemenkeu
 - 1) RENSTRA ITJEN Th.2020-2024
 - 2) RENJA KRISNA Th.2022
 - 3) RKAKL, KAK dan RAB periode pagu anggaran Th.2022 sesuai Redisgn Sistem Perencanaan Penganggaran Pemerintah (RSPP)
 - 4) RKAKL, KAK dan RAB periode Alokasi anggaran Th.2022
 - 5) Konsep RENSTRA ITJEN Th.2020-2024
 - 6) Kegiatan koordinasi, sosialisasi, supervisi-reviu-penelaahan RKAKL periode pagu anggaran Th.2022

- 7) Kegiatan koordinasi, sosialisasi, supervisi - revidu - penelaahan RKAKL periode pagu anggaran Th.2022
 - 8) Kebijakan Pengawasan Th.2022
 - 9) PKPT, PKAU dan Kalender Kerja Th.2022
 - 10) Procurement Plan dan Disbursheement Plan Th.2022
 - 11) Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan Th.2020-2024
 - 12) Perjanjian Kinerja Th.2022; dan
 - 13) Kebutuhan Anggaran Th.2023 Revisi Adjusment dengan mekanisme self blocking untuk mengantisipasi pendanaan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan Covid Nasional.
- b. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Reformasi Birokrasi ITJEN dan pengelolaan capaian target RB per triwulan.
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja berkala (LKIP, SPIP, LAPTAH, Manajemen Risiko, PMPI, Layanan Kesekretariatan) dan Bahan Rapat Pimpinan
 - d. Koordinator ISO SMAP 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan
 - e. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Th.2021 dan koodinator pelaksaasn survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK Th. 2021
 - f. Penyusunan TARJA ITJEN dan Turunan TARJA ITJEN ke KANWIL Th.2022 dan penilaian Th. 2021.
 - g. Publikasi Berita Pengawasan melalui website dan media sosial itjen
 - h. Kerjasama menyusun Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Instansi lain.
 - i. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada aplikasi <http://jdih.itjenkemenkumham.go.id>
 - j. Pengelolaan Kepegawaian.
 - k. Revisi Auto Adjusment.

Rekapitulasi Diklat Kepegawaian selama Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
1	<i>Digital Learning</i> Manajemen Keuangan Negara Menengah (DIPA KEMENKEU)	4	20	1. 1 s.d. 5 Februari 2. 15 s.d. 19 Februari 3. 1 s.d. 5 Maret 4. 22 s.d. 26 Maret	1. Sarwadi, S.H., M.H. 2. Lusi Handayani, S.E., M.M. 3. Emmania Novada Sudarno, S.E. 4. Erwin, S.E.	<i>E-learning</i>
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CXCIII (DIPA BPSDM)	3	117	3 Februari s.d. 31 Mei	1. Nurmalasari, S.H., M.H. 2. Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H. 3. Parlindungan Donni, S.H., M.H.	Pembelajaran Jarak Jauh
3	Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (DIPA BPSDM)	1	2	9 s.d. 10 Februari	Een Setia Suharjito, S.E., M.M.	Pembelajaran Jarak Jauh
4	Pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) (DIPA BPSDM)	49	14	11 Februari s.d. 3 Maret	1. Monica Ronauli Saraswaty Sinaga, S.E. 2. Fransiska Sri A. Tarigan, S.E. 3. Alfredo S. Meliala, S.AP. 4. Y.AdityaAnggara P., S.H. 5. Henni Maria Marpaung, S.Psi. 6. Alex Tumpal Hutajulu, S.E. 7. Yora Rolin Bangun, S.H. 8. Iwan Putra Siregar, S.H. 9. Prasetya Putra Perdana Harefa, S.Psi. 10. Debora Chyntia Eka Putri, S. Psi. 11. Reni Melynda Hutapea, S. Psi. 12. Muhamad Suhandwifa, S. Psi. 13. Gaufani Majid Masrifa, S.Ak. 14. Vania Reghinalrsya, S. Ak.	<i>E-Learning</i>

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					15. Ahmadi Anjas, S.I.P. 16. Indah Pertiwi, S.Psi. 17. RizkyHerviani, S.H. 18. Mhd.ChairilAmbya, S.H. 19. RizaNugraheni, S.Ak. 20. Elma NurHikmah, S.E. 21. TututAsmorowati, S.E. 22. Rana Aulia, S.E. 23. BerlianiAzizah, S.A.P. 24. Nirwana Ellen Nora, S.IP. 25. NimasZaky Nabila, S.E. 26. AzizahFarahdibaWairooy, S.E. 27. Desy Arista Prapitasari, S.H. 28. Anita Cameliana, S.Psi. 29. DevinalkaPratiwi, S.Psi. 30. MutiaraEndahCahyani, S.E. 31. Bara Dynata, S.H. 32. Dian LatiUtami, S.Psi. 33. Aziz Pilar Syefiaji, S.A.P. 34. Saadia Santi, S.E. 35. EviPrastuti, S.Ak. 36. AnastiDwiMartantyaKinasih, S.Ak. 37. RatihManggarsari, S. Psi. 38. SitiAfifah, S.E. 39. Wahyulriani, S.A.P. 40. Abdi, S.St.Ars. 41. Reynaldi Effendi Putra, S.E. 42. ErvianaRahayu, S.E. 43. Ivan SatriaNurrahman, S.E. 44. Dania Akhmad, S.E. 45. CendikiaHazwir, S.E. 46. Davin NaufalJoviando, S.E. 47. InasMaisa, S.I.Kom. 48. Tommy Roy Sirait, S.Kom.	

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					49. Harry Dickson Simbolon, S.E.	
5.	Pelatihan Audit IT (DIPA BPSDM)	32	4	1 s.d4 Maret	1. Abdul Hamid 2. Tri Andayani 3. Siti Sofiatun 4. Tessa Leo 5. Ari Prambudi 6. Dewi Ayu Nurmalasari 7. Zaifachatur Roziah 8. Dhony Alfianto 9. Tri Darma Manulang 10. Ade Machmud Apriansyah 11. Faisal Afifi 12. Patria Ratna Sari 13. Adi Agustina Br. Girsang 14. Andriyanto Wahyu Prasetyo 15. Tyas Setyaningrum 16. Fera Arindra Tri Anestya 17. Erbata Sri Muliadini 18. Ardiles Ricky Susilo 19. Indri Eka Wardhani 20. Bosarlmanuel 21. Dwi Ari Wibowo 22. Ayu Yoana Sari 23. Erie Wijaya 24. R. Eri Irawan Sumanto 25. Bambang Purwantho 26. Iqbal Albert Husin 27. David Maradona Lumbanbatu 28. Ichsanudin Eko Saputro 29. Ami Amatunissa 30. Agung Natanael 31. Edy Prabowo Saputro 32. Ade Rizke Putri Wibowo	Gedung B2 STT NurulFikri
6.	Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat	1	27	14 Februari.s.d 12 Maret	Brahmantya Puji Kurniariadi, S.E., M.H.	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
	Keahlian Angkatan I (DIPA BPSDM)					
7.	Pelatihan Reformasi Birokrasi (DIPA BPSDM)	49	6	5 s.d 12 Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monica Ronauli Saraswaty Sinaga, S.E. 2. Fransiska Sri A. Tarigan, S.E. 3. Alfredo S. Meliala, S.AP. 4. Y. Aditya Anggara P., S.H. 5. Henni Maria Marpaung, S.Psi. 6. Alex Tumpal Hutajulu, S.E. 7. Yora Rolin Bangun, S.H. 8. Iwan Putra Siregar, S.H. 9. Prasetya Putra Perdana Harefa, S.Psi. 10. Debora Chyntia Eka Putri, S. Psi. 11. Reni Melynda Hutapea, S. Psi. 12. Muhamad Suhandwifa, S. Psi. 13. Gaufani Majid Masrifa, S.Ak. 14. Vania Reghina Irsya, S. Ak. 15. Ahmadi Anjas, S.I.P. 16. Indah Pertiwi, S.Psi. 17. Rizky Herviani, S.H. 18. Mhd. Chairil Ambya, S.H. 19. Riza Nugraheni, S.Ak. 20. Elma Nur Hikmah, S.E. 21. Tutut Asmorowati, S.E. 22. Rana Aulia, S.E. 23. Berliani Azizah, S.A.P. 24. Nirwana Ellen Nora, S.IP. 25. Nimas Zaky Nabila, S.E. 26. Azizah Farahdiba Wairooy, S.E. 27. Desy Arista Prapitasari, S.H. 28. Anita Cameliana, S.Psi. 29. Devina Ika Pratiwi, S.Psi. 30. Mutiara Endah Cahyani, S.E. 	<i>E-Learning</i>

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					31. Bara Dynata, S.H. 32. Dian LatiUtami, S.Psi. 33. Aziz Pilar Syefiaji, S.A.P. 34. Saadia Santi, S.E. 35. EviPrastuti, S.Ak. 36. AnastiDwiMartantyaKinasih, S.Ak. 37. RatihManggarsari, S. Psi. 38. SitiAfifah, S.E. 39. Wahyulriani, S.A.P. 40. Abdi, S.St.Ars. 41. Reynaldi Effendi Putra, S.E. 42. ErvianaRahayu, S.E. 43. Ivan SatriaNurrahman, S.E. 44. Dania Akhmad, S.E. 45. CendikiaHazwir, S.E. 46. Davin NaufalJoviando, S.E. 47. InasMaisa, S.I.Kom. 48. Tommy Roy Sirait, S.Kom. 49. Harry Dickson Simbolon, S.E.	
8.	Pelatihan Manajemen Risiko (DIPA BPSDM)	30	5	22 s.d. 26 Maret	1. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H. 2. Ismanjono, S.H. 3. Titut Sulistyarningsih, S.H., M.H. 4. Ari Prambudi, S.H., M.H. 5. M.H. Kesuma Negara, S.H., M.M. 6. Harry Lesmana, S.T., M.Si. 7. Eka Setyawati, S.H., M.H. 8. Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H. 9. Petrus Moko Handoko, S.H., MSM. 10. Niken Ayu Kusumaningpuri, S.H.	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					11. Verawati, S.E. 12. Rino Adi Putro, S.H. 13. Patria Ratna Sari, S.E. 14. Tri Sayekti Ningsih, S.H., M.Si. 15. Helmy Ahirul Apriandi, S.H. 16. Christian Immanuel Hasudungan, S.Sos. 17. Wahyu Ramanda, S.E. 18. Surya Narendra, S.H. 19. Nindra Wahyu Hapsari, S.H. 20. Silvina Sari, S.E. 21. Firman Septa Firdaus, S.H. 22. Raden Bagus Wasito Utomo, S.H., M.H. 23. Hendra Anggara Saputra, S.E. 24. Henni Noor Utami, S.H. 25. Heriyanto Tri Ratmoko, A.Md. 26. Prisi Khairani Arief, S.H. 27. Nindya Ayu Nirmala, S.H. 28. Anggit Sri Rahayu, S.E. 29. Sherly Mircella Septiyana, S.H.	
9.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CXCIV (DIPA BPSDM)	2	96	22 Maret s.d. 7 Juli	1. Brahmantya Puji Kurniariadi, S.E., M.H. 2. Moch. Kristanto, S.E.	Pembelajaran Jarak Jauh
10.	Pelatihan 21 Days To Be Transhuman (Diklat Pembentukan Karakter ASN TA. 2021) (DIPA ITJEN)	22	1	15 April	1. Fendy Prasetyo, S.H., M.H. 2. Neni Ayuni, S.H., M.H. 3. Indah Dwi Widyasih, S.A.P. 4. Agung Pambudi Kurniawan 5. Seprinaldo, S.Kom. 6. Artika Julianti, S.E. 7. Januarino Aditya, S.E., M.E. 8. Kurnia Putri Natalia Lumbantoruan, A.Md. 9. Nisa Amelina, A.Md. 10. Puji Hayati, A.Md.	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					11. Winda Yunika, S.H. 12. Sevry Jonny Gunawan Sihaloho, S.Sos. 13. Rifan Wahyu Permana, S.Sos. 14. Dewi Endar Yatun, S.E. 15. Robi Rolis Saputra, S.E. 16. Latiefah Kusumawati, S.Kom. 17. Raja Asrubi Eka Putra, S.E. 18. Mar'atun Isnaeni, S.I.A. 19. Cindy Claudia Sari, S.E. 20. Ruri Handiyani Pratiwi, S.E. 21. Silvina Sari, S.E. 22. Raymond Tinating Pangihutan Siagian, S.H.	
11.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CXCV Tahun Anggaran 2021	2	96	5 Mei s.d. 27 Agustus	1. Tri Darma Manulang, S.H., M.H. 2. Een Setia Suharjito, S.E., M.M.	Pembelajaran Jarak Jauh
12.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	2	17	31 Mei s.d. 23 Juni	1. Sherly Mircella Septiyana, S.H. 2. Aprilia Wulandari, S.H.	Pembelajaran Jarak Jauh
13.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan I	2	32	2 Juni s.d. 15 Juli	1. Wahyudi, S.H. 2. Elmira Oktarina, S.H.	Pembelajaran Jarak Jauh
14.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VIII – XV	41	70	2 Juni s.d. 10 September	1. Abdi 2. Ahmadi Anjas 3. Alex Tumpal Hutajulu 4. Alfredo S. Meliala 5. Anita Cameliana 6. Aziz Pilar Syefiaji 7. Azizah Farahdiba Wairooy 8. Bara Dynata 9. Berliani Azizah 10. Cendikia Hazwir 11. Dania Akhmad 12. Davin Naufal Joviando 13. Debora Chyntia Eka Putri 14. Desy Arista Prapitasari	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					15. Devina Ika Pratiwi 16. Dian Lati Utami 17. Elma Nur Hikmah 18. Erviana Rahayu 19. Evi Prastuti 20. Fransiska Sri A. Tarigan 21. Gaufani Majid Masrifa 22. Harry Dickson Simbolon 23. Henni Maria Marpaung 24. Inas Maisa 25. Indah Pertiwi 26. Ivan Satria Nurrahman 27. Iwan Putra Siregar 28. Mhd.Chairil Ambya 29. Monica Ronauli Saraswaty Sinaga 30. Muhamad Suhandwifa 31. Mutiara Endah Cahyani 32. Riza Nugraheni 33. Rizky Herviani 34. Saadia Santi 35. Siti Afifah 36. Tommy Roy Sirait 37. Tutut Asmorowati 38. Vania Reghina Irsya 39. Wahyu Iriani 40. Y.Aditya Anggara P. 41. Yora Rolin Bangun	
15.	Pembelajaran Interaktif untuk Pengelola Whistleblowing System Pengaduan Korupsi	3	4	7 s.d. 10 Juni	1. Puji Hayati 2. Ari Fachryadi 3. Ridha Faridha Djoyo	Pembelajaran Jarak Jauh
16.	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Muda	4	14	8 s.d. 12 Juni	1. Adi Priyo Pratomo, S.H., M.H. 2. David Maradona Lumban Batu, S.H. 3. Fendy Prasetyo, S.H., M.H.	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					4. Indra Saputra, S.H.	
17.	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi Bagi APIP	2	7	13 s.d. 19 Juni	1. Siti Sofiatun, S.E., M.Si. 2. Tri Andayani, S.E., M.M.	Hotel Padjajaran, Kota Bogor
18.	Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya	7	14	14 Juni s.d. 9 Juli	1. Agus Rianto, S.E., M.H. 2. Anton Parasian, S.H., M.Si. 3. Ardiles Ricky Susilo, S.H., M.H. 4. Dwi Ari Wibowo, S.H., M.M. 5. Harry Lesmana, S.T., M.Si. 6. Junita Aristiati, S.E., M.Si. 7. Nopalisa Egitulas Vembilan, S.Kom., M.M.Si.	Pembelajaran Jarak Jauh
19.	Diklat Certified Risk Associate (CRA)	11	2	19 s.d. 20 Juni	1. Joko Martanto, S.E., M.Si. 2. Muhamad Mufid, S.Ag., M.Si., M.H. 3. Slamet Iman Santoso, S.E., M.M. 4. Nanih Kusnani, A.Md., S.Sos., M.Ak. 5. Baneriyama, S.H., M.H. 6. Tiarna Rosa Sinaga, S.H., M.H., M.Ak. 7. Maddalena Saragi, S.H., M.Kn., M.M. 8. Ristianti Muji Kartikasari, S.H., M.Si. 9. Junita Aristiati, S.E., M.Si. 10. Arman Syah Razak, S.E. 11. Surya Narendra, S.H.	Pembelajaran Jarak Jauh
20.	Pelatihan Audit Jasa Konstruksi	30	5	21 s.d. 25 Juni	1. Abdul Hamid, S.E., M.M. 2. Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H. 3. Andriyanto Wahyu Prasetio, S.H., M.H. 4. Anton Kurniawan, A.Md., S.H. 5. Ari Prambudi, S.H., M.H.	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	NamaPeserta	Tempat Penyelenggaraa n
					6. Asih Retno Sayekti, A.Md., S.Kom. 7. Bambang Purwantho, S.H., M.Si. 8. Bosar Immanuel, S.E. 9. Chandra Julius Foster Manalu, S.E. 10. Dewi Ayu Nurmalasari, A.Md.Im., S.H. 11. Dewi Kurniati Airlangga, S.E. 12. Faisal Afifi, S.H. 13. Galuh Purnomo, S.Sos. 14. Handityo Nugroho, S.E. 15. Hendra Anggara Saputra, S.E. 16. Henni Noor Utami, S.H. 17. Kurniawan, A.Md., S.H. 18. M Fahrullah, S.H. 19. Ristianti Muji Kartika Sari, SH.,MSi. 20. Niken Ayu Kusumaningpuri, S.H., M.H. 21. Nur Sofiyah, A.Md., S.I.P., M.Ak. 22. Puji Raharto, S.IP., M.M. 23. R.Eri Irawan Sumanto, S.H., M.Kn. 24. Raden Bagus Wasito Utomo, S.H., M.H. 25. Raden Roro Rizqi Pujaswati, S.H. 26. Rani Octariani, S.H., M.H. 27. Retna Wandita, S.H. 28. Ria Wahyu Tanjung Sasongko, S.E. 29. Tessa Leo Marlino, S.H., M.H.	

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					30. Widya Purnamasari, S.H., M.H.	
21.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XVI s.d XXIII	7	70	29 Juni s.d. 7 Oktober	1. Nimas Zaky Nabila 2. Nirwana Ellen Nora 3. Prasetya Putra Perdana Harefa 4. Rana Aulia 5. Ratih Manggarsari 6. Reni Melynda Hutapea 7. Reynaldi Effendi Putra	Pembelajaran Jarak Jauh
22.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Teknis Dasar	4	11	3 s.d. 14 Juli	1. Dhony Alfianto 2. Efi Handayani 3. Sandra Nur Fitri 4. Ruri Handiyani	Pembelajaran Jarak Jauh
23.	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi Bagi APIP	4	5	5 s.d. 9 Juli	1. Nasrudin Nurdiansyah, S.H., M.Si.; 2. Muh Fatchul Ulum, S.E.	Hotel The Mirah, Jln. Pangrango, Kota Bogor
24.	Pelatihan Auditor Muda	7	28	29 Juni s.d. 8 Juli 15 s.d. 29 Juli	1. Asih Retno Sayekti 2. Dwi Sumarwanto 3. Helmy Ahirul Apriandi 4. Tri Sayekti Ningsih 5. Raden Roro Rizqi Pujaswati 6. Retna Wandita 7. Ria Wahyu Tanjung Sasongko	Pembelajaran Jarak Jauh
25.	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan X	3	10	19 s.d. 28 Juli	1. Rintaka Jayadi Brata, S.Kom. 2. Nia Wulandari, S.E. 3. Nisa Amelina, A.Md.	Pembelajaran Jarak Jauh
26.	Pelatihan Auditor Madya	3	14	26 Juli s.d. 3 Agustus 18 s.d. 25 Agustus	1. Fandyla Wahyu Sasongko 2. Iqbal Albert Husin 3. Ristianti Muji Kartika Sari	Pembelajaran Jarak Jauh
27.	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	3	4	24 s.d. 26 Agustus 1 September	1. Nanih Kusnani 2. Niken Ayu Kusumaningpuri 3. Latiefah Kusumawati	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
28.	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Government Accounting Associate (CGAA)</i>	3	4	25 s.d. 27 Agustus 2 September	1. Bossar Immanuel 2. Zein Ihya Ulumuddin 3. Raja Asrubi Eka Putra	Pembelajaran Jarak Jauh
29.	Pelatihan dan Sertifikasi CFA	1	8	26 s.d. 30 Juli 18 s.d. 20 Agustus	1. Tiarma Rosa Sinaga	Pembelajaran Jarak Jauh
30.	Pelatihan Cybersecurity Essentials	2	19	6 s.d. 30 September	1. Bagus Dwi Laksono 2. Ayu Yoana Sari	Pembelajaran Jarak Jauh
31.	Pelatihan Business Process Engineer	5	13	6 s.d. 22 September	1. Ari Fachryadi 2. Rintaka Jayadi Brata 3. Muhammad Mundzir Wijdani 4. Yudhi Hervino 5. Seprinaldo	Pembelajaran Jarak Jauh
32.	Pelatihan Data Science Fundamental	1	5	6 s.d. 10 September	1. Erwin	Pembelajaran Jarak Jauh
33.	Pelatihan Junior Network Administrator	1	5	6 s.d. 10 September	1. Andi Trias Aryanto	Pembelajaran Jarak Jauh
34.	Pelatihan Junior Graphic Designer	1	5	6 s.d. 10 September	1. Muhammad Fadlika Donie Paron	Pembelajaran Jarak Jauh
35.	Pelatihan Digital Public Relations	1	5	6 s.d. 10 September	1. Ratna Ningsih	Pembelajaran Jarak Jauh
36.	Pelatihan Penilaian Angka Kredit JFA	3	4	7 s.d. 10 September	1. Fecha Paul Pangaribuan 2. Melisa Wahyuni 3. Raden Roro Rizqi Pujawati	Pembelajaran Jarak Jauh
37.	Pelatihan dan Sertifikasi CGAA	3	3	8 s.d. 10 September 16 September	1. Agung Nugroho 2. Parlindungan Donni 3. Kiki	Pembelajaran Jarak Jauh
38.	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar Metode e-learning Angkatan I – III Tahun 2021	2	8	17 s.d. 24 September	1. Anggit Sri Rahayu 2. Ridha Faridha Djoyo	e-learning
39.	Diklat dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi	41	14	17 s.d. 22 September 17 s.d. 22 Oktober	1. Nanih Kusnani, A.Md., S.Sos., M.Ak. 2. Syahrizal Lubis, S.H, MH 3. Baneriana, S.H., M.H	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	NamaPeserta	Tempat Penyelenggaraa n
					4. Denny Darmawan, S.E., M.H. 5. Dian Saptawati, S.E., M.Si. 6. Parlindungan Donni, S.H 7. Moch. Kristanto, S.E. 8. Brahmantya Puji Kurniariadi, S.E., M.H. 9. Een Setia Suharjito, S.E., M.M. 10. Febrilia Rasmahita, S.E., M.H. 11. Fecha Paul Pangaribuan, S.H., M.H 12. Lusi Handayani, S.E., M.M. 13. Heru Saprudin, S.H. 14. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H 15. Aman Agung Kurniawan, S.H. 16. Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si. 17. Indah Dwi Widyasih, S.A.P. 18. Melisa Wahyuni, S.E. 19. Sherly Mercella Septiyana, S.H. 20. Apriliya Wulandari, S.H. 21. Maria Cathalina Corina Susanto, S.IAN. 22. Elmira Oktarina, S.H. 23. Wahyudi, S.H. 24. Nasrudin Nurdiansyah, S.H., M.Si 25. Kiki, S.AB. 26. Dedi Novianto, S.E. 27. Satrio Whinasis Purboaji, S.H. 28. Seprinaldo, S.Kom. 29. Ayu Yoana Sari, S.Kom. 30. Nindya Ayu Nirmala, S.H. 31. Prisi Khairani Arief, S.H 32. Januarino Aditya, S.E., M.E. 33. Winda Yunika, S.H.	

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					34. Erwin, S.E. 35. Anggit Sri Rahayu, S.E. 36. Novaz Achwaluddin, S.E. 37. Robi Rolis Saputra, S.E. 38. Puji Hayati, A.Md. 39. I Made Wedha Satria 40. Aji Prasetyo Prambudi 41. Ridha Faridha Djoyo, S.E.	
40.	Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya	1	18	20 s.d. 28 September 12 s.d. 20 Oktober	1. Nanih Kusnani	Pembelajaran Jarak Jauh
41.	Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga	4	7	26 September s.d. 2 Oktober	1. Prisi Khairani Arief 2. Mar'atun Isnaeni 3. Mulyani Fitri 4. Novaz Achwaluddin	Swiss-Belhotel Jln. Salak No. 38-40, Bogor, Jawa Barat
42.	Diklat Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	23	1 s.d. 23 November	1. Maria Cathalina Corina Susanto	Pembelajaran Jarak Jauh
43.	E-Learning Calon Ahli Pembangun Integritas	27	5	15 s.d. 19 November	1. M Rusli B, S.H. 2. Ismanjono, S.H. 3. Drs. Endang Supriyatno, S.E., M.Si. 4. Ari Fardianto, S.E. 5. Maddalena Saragi, S.H., M.Kn., M.M. 6. Tri Andayani, S.E., M.M. 7. Ami Amatunissa, S.H., M.H. 8. Rani Octariani, S.H., M.H. 9. Erbata Sri Muliadini, S.H., M.M. 10. Ari Prambudi, S.H., M.H. 11. M.H. Kesuma Negara, S.H., M.M. 12. Tessa Leo Marlino, S.H., M.H. 13. Nopalisa Egitulas Vembilan, S.Kom., M.M.Si. 14. Iqbal Albert Husin, S.H., M.Kn., M.Si.	Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
					15. Fandyla Wahyu Sasongko, S.H., M.Si. 16. M Fahrullah, S.H., M.H. 17. Abdul Hamid, S.E., M.M. 18. Edy Prabowo Saputro, S.Kom., M.Si. 19. Dewi Ayu Nurmalasari, A.Md.Im., S.H. 20. Asih Retno Sayekti, S.Kom. 21. Chandra Julius Foster Manalu, S.E. 22. Tyas Setyaningrum, S.H. 23. Raden Roro Rizqi Pujaswati, S.H. 24. Hendra Anggara Saputra, S.E. 25. Faisal Affi, S.H. 26. Henni Noor Utami, S.H. 27. Rini Yuniasih, A.Md.	

I. Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dibangunnya Sistem Informasi Pengawasan (SIP). Dalam hal melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Sistem Informasi Pengawasan, pengelolaan program pelaporan pengendalian gratifikasi, *Whistle Blowing System*, penanganan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan data hasil pengawasan dan hukuman disiplin. Berikut pencapaian Tahun 2021:

- Penanganan pengaduan masyarakat dan/atau Whistleblowing System (WBS)

Pengaduan masyarakat pada Inspektorat Jenderal dibangun melalui sarana-sarana pengaduan sebagai berikut:

- Website Resmi Kementerian Hukum dan HAM
- Surat elektronik dengan alamat: itjen@kemenkumham.go.id
- Po.Box. 3489
- SMS Gateway nomor 08111377803
- Surat biasa yang ditujukan ke Menkumham dan Inspektur Jenderal
- Berita Surat Kabar
- Salinan Disposisi LAPORI
- Pengaduan melalui wbs.kemenkumham.go.id

Berikut merupakan penanganan pengaduan berdasarkan kanal penerimaan:

Kategori pengaduan atau jenis permasalahan pengaduan:

No	Sumber atau Tujuan	Tindak Lanjut								
		Belum			Proses			Selesai		
		Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
1	Website Resmi Kementerian Hukum dan HAM (http://www.kemenkumham.go.id)	0	0	0	0	0	-	0	0	-
2	Laman Resmi Inspektorat Jenderal dengan alamat : (http://itjen.kemenkumham.go.id)	0	0	0	0	0	-	0	0	-
3	Po.Box. 3489	0	0	0	0	0	-	0	0	-
4	SMS Gateway Inspektur Jenderal nomor 08111377803	0	0	0	0	0	-	0	0	-
5	Surat biasa yang ditujukan ke Menkumham dan Inspektur Jenderal	0	0	0	19	15	0	4	3	-
6	Berita Surat Kabar	0	0	0	0	0	-	0	0	-
7	Salinan Disposisi LAPORI	0	0	0	0	1	-	0	0	-
8	Pengaduan melalui wbs.kemenkumham.go.id	0	0	0	8	1	0	4	0	-
Jumlah		0	0	0	27	17	0	8	3	-

No	Jenis Permasalahan	Jumlah Pengaduan Masuk		
		Okt	Nov	Des
1	Narkoba	2	2	
2	Pungli, Percaloan & Pengurusan Dokumen	2	2	
3	Pelanggaran Disiplin Pegawai / Kepegawaian	4	4	
4	Pelayanan AHU	4	0	
5	Barang Milik Negara	0	0	
6	Korupsi	0	0	
7	Pelayanan HAM	0	0	
8	Pelayanan KI	2	0	
9	Pelayanan PAS	3	4	
10	Pelayanan IMI	4	2	
11	Kekerasan / Tindak Pidana	0	0	
12	Pengadaan Barjas/BAMA/BMN	1	1	
13	Perilaku Amoral, Perselingkuhan & KDRT	4	3	
14	Penyalahgunaan wewenang, Mal Administrasi, Pemerasan dan Penganiayaan	2	1	
15	Pengawasan Notaris	0	0	
16	Lain-lain	0	0	
17	Bukan Kewenangan Kemenkumham	7	1	
TOTAL		35	20	

BAB IV
RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM TAHUN 2022

A. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

1. Pagu Inspektorat Jenderal TA. 2022 sebesar **Rp. 76.877.008.000,-** (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Rupiah).
2. Terdapat anggaran sebesar Rp. 435.400.000,- dalam Lampiran II DIPA yang termasuk dalam kategori “Tercatat/ Blokir” terkait dengan belum adanya *Clearance* dari Kemenkominfo dan Kemenpan RB terkait dengan pengadaan Teknologi, Informasi dan komunikasi (TIK), yaitu:
 - Pengadaan Server sebesar Rp. 260.400.000,-
 - Pengadaan Anti virus sebesar Rp. 175.000.000,-
 Permasalahan / kendala ini juga dihadapi oleh seluruh Unit Eselon I yang mengajukan *Clearance* ke Kemenkominfo dan Kemenpan RB.
3. Terdapat anggaran sebesar Rp. 17.187.186.000,- dalam Lampiran IV.A DIPA yang termasuk dalam kategori “Tercatat/ Blokir” terkait dengan *Automatic Adjustment* untuk pencadangan dana untuk penanganan pandemi *Covid-19* di TA.2022, yaitu:
 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I sebesar Rp. 1.271.563.000,-
 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar Rp. 1.032.040.000,-
 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III sebesar Rp. 893.407.000,-
 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV sebesar Rp. 1.001.204.000,-
 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V sebesar Rp. 1.327.198.000,-
 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI sebesar Rp. 4.183.523.000,-
 - Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 7.478.251.000,-
 - Sehingga Pagu DIPA ITJEN TA.2022 setelah pencadangan sebesar Rp 59.689.822.000,-

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	RUPIAH MURNI (RM)			
		PAGU AWAL 2022	BLOKIR (RM)	BLOKIR EKSISTING (CLEARANCE TIK)	TOTAL PAGU DILUAR BLOKIR
1	2	3	4	5	6
013.02.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1563.	Itwil I	5.599.719.000	1.271.563.000	-	4.328.156.000
1564.	Itwil II	5.599.719.000	1.032.040.000	-	4.567.679.000
1565.	Itwil III	5.599.719.000	893.407.000	-	4.706.312.000
1566.	Itwil IV	5.599.719.000	1.001.204.000	-	4.598.515.000
1567.	Itwil V	5.599.719.000	1.327.198.000	-	4.272.521.000
1568.	Itwil VI	10.107.977.000	4.183.523.000	-	5.924.454.000
1569.	Sekretariat ITJEN	38.770.436.000	7.478.251.000	435.400.000	30.856.785.000
	GRAND TOTAL	76.877.008.000	17.187.186.000	435.400.000	59.254.422.000

C. AUDIT TEMATIK

Melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja yang memiliki anggaran besar dan rawan penyimpangan serta Satuan Kerja yang belum pernah dikunjungi/dilakukan pengawasan. Selain itu akan dilakukan pula kegiatan pengawasan berupa audit tematik/majemuk dengan tema Audit Pengelolaan Sumber Daya Manusia (mutasi, promosi dan pengangkatan) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum melaksanakan audit tematik tersebut akan disusun Pedoman audit oleh tim yang ditetapkan dengan SK Inspektur Jenderal beranggotakan para Inspektur Wilayah, auditor dan perwakilan sekretariat

D. PANCA PROGRAM TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-43.OT.02.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 menetapkan bahwa Panca Program Unggulan Itjen sebagai berikut:

1. Menyapa, Mengajarkan, dan Menyadarkan

Kegiatan diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai tindak lanjut dari program *teetor-GM*. Kegiatan menyapa, mengajarkan, dan menyadarkan sekaligus bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan ini akan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah beserta jajarannya dengan memanfaatkan sarana virtual.

2. Aktif Belajar

Kegiatan Gerakan Lima Hari Belajar (Gemar) yang semula dilaksanakan selama 5 hari diefektifkan menjadi 2 hari dalam sebulan agar maksimal sehingga pegawai berkesempatan untuk melakukan tugas lainnya.

3. Audit Berbasis Risiko dan Audit Tematik

Melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja yang memiliki anggaran besar dan rawan penyimpangan serta Satuan Kerja yang belum pernah dikunjungi/ dilakukan pengawasan.

4. Remote Audit

Peningkatan pelaksanaan audit/pengawasan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan metode jarak jauh.

5. E-Mawas Ver. 2022

Pemutakhiran e-Mawas Versi 2021.

Untuk mendukung pelaksanaan Panca Program unggulan di setiap Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal menyusun rekapitulasi implementasi Panca program Unggulan sesuai dengan format yang disampaikan kepada para penanggungjawab. Selanjutnya melaporkan implementasi Panca Program unggulan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulan) kepada Inspektur Jenderal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sasaran dan target Program serta Kegiatan ditetapkan dalam Indikator Kinerja dan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Inspektorat Jenderal selama Tahun 2021 telah berupaya menerapkan pengawasan yang lebih mengarah kepada pendekatan pengawasan berbasis risiko dengan menekankan mekanisme pengawasan berupa *advisory service* dan *quality assurance*. Fokus pengawasan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 pada pengawasan akuntabilitas dan integritas untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal
3. Kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pendampingan dan pemantauan secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan target dan mendukung terhadap pencapaian IKU Inspektorat Jenderal maupun IKK yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
4. Kinerja Inspektorat Jenderal selama Tahun 2021 yang positif dalam mendukung kinerja Inspektorat Jenderal, antara lain pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, Penyelenggaraan SPIP yang baik, Perapan Manajemen Risiko, Pengelolaan Reformasi Birokrasi, Pengelolaan TARJA dan aplikasi Monitoring Evaluasi.
5. Pencapaian kegiatan penguatan pengawasan terkait informasi Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), LHKASN serta kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pengawasan dan Akuntabilitas aparatur Kementerian terhadap 33 Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
6. Capaian realisasi anggaran Inspektorat Jenderal TA 2021 baik yaitu mencapai Rp60.448.938.681 atau mencapai 97,75%.

B. Kendala

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama Tahun 2021, antara lain :

1. Masih kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.

2. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) masih belum optimal.
3. Kualitas hasil audit belum optimal.
4. Jaminan kualitas dan pemberian konsultasi yang diberikan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh satuan kerja dalam pelaksanaan tugas fungsi.

C. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Inspektorat Jenderal di masa datang terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian skala prioritas dalam penentuan kegiatan dan anggaran yang difokuskan untuk mendukung pencapaian target kinerja untuk mengantisipasi kebijakan eksternal maupun internal
2. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan penambahan diklat fungsional auditor maupun diklat-diklat lain yang dapat menunjang kinerja di Inspektorat Jenderal.
3. Pemanfaatan informasi yang berasal dari e-MAWAS yang sudah ada dan berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal mengumpulkan data pengawasan dalam rangka menunjang kinerja pengawasan di Inspektorat Jenderal.
4. Melaksanakan pemantauan secara periodik atau sesuai kebutuhan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal (BPK, BPKP, KemenPAN-RB, dan KPK) dalam membantu pencapaian kinerja.
6. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dan terbuka antara instansi pusat dan daerah mengingat pengaduan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.
7. Secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, sarana dan prasarana agar fungsi pengawasan yang dilakukan tetap berjalan maksimal.

**Laporan Akhir Tahun
Tahun Anggaran 2021
Inspektorat Jenderal**

